

**PERAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PEMILU
PRESIDEN AFGHANISTAN TAHUN 2014**

(Skripsi)

Oleh

Antonius Yudi Kristiyanto



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

PERAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PEMILU PRESIDEN AFGHANISTAN TAHUN 2014

Antonius Yudi Kristiyanto

Penjaminan hak politik perempuan di Afghanistan telah diberikan pasca Taliban, namun persentase hak pilih perempuan dalam pemilihan umum mengalami penurunan dari 2004 hingga 2010. Tahun 2014 Afghanistan menyelenggarakan pemilu, serta dengan menjadi anggota *United Nations Women* tahun 2010 maka peneliti bertujuan untuk mengetahui peran UN Women dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada pemilu presiden Afghanistan tahun 2014. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu feminisme liberal, peranan organisasi internasional menurut Clive Archer dan partisipasi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan UN Women berdasarkan program dan perannya sebagai organisasi internasional mendukung terjadinya peningkatan dalam hak pilih tahun 2014. Terdapat tiga hal utama yang dilakukan UN Women untuk melaksanakan programnya yaitu: bantuan dana, perlindungan hukum serta bekerjasama dengan mitra lokal. Berdasarkan perannya sebagai instrumen, UN Women digunakan Afghanistan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negaranya mendukung kemerdekaan HAM dan kesejahteraan rakyat sesuai konstitusinya. Sebagai arena, Afghanistan memanfaatkan UN Women sebagai wadah melalui forum internasional untuk mendapatkan dukungan dari komunitas internasional berupa bantuan dana dan keamanan. Sebagai aktor independen, UN Women di Afghanistan memiliki tiga pilar dan programnya sendiri. Walaupun menurut Clive Archer sebagai aktor independen organisasi internasional tidak terikat, dalam menjalankan programnya UN Women tetap melakukan kerjasama dengan mitra lokal, kementerian dalam negeri dan komisi pemilihan independen.

Kata Kunci: UN Women, Afghanistan, Partisipasi Politik Perempuan, Organisasi Internasional

ABSTRACT

THE ROLE OF UNITED NATIONS WOMEN IN SUPPORTING WOMEN PARTICIPATION IN THE AFGHANISTAN PRESIDENTIAL ELECTION IN 2014

Antonius Yudi Kristiyanto

The guarantees of women's political rights in Afghanistan have been given after the Taliban, but the percentage of women voting rights in general elections decreased from 2004 to 2010. In 2014 Afghanistan held elections, and by becoming a member of the United Nations Women in 2010 the researcher aim to find out the role of the UN Women in supporting women participation in the Afghan presidential election in 2014. Theories and concepts used in this study are liberal feminism, the role of international organizations according to Clive Archer and political participation. The results of this study indicate that the role of UN Women based on the program and its role as an international organization supports an increase in women's vote in 2014. There are three main things that UN Women do to implement the program, namely: financial assistance, legal protection and collaboration with local partners. Based on its role as an instrument, UN Women used Afghanistan to show the international community that its country supports human rights independence and people's welfare in accordance with its constitution. As an arena, Afghanistan uses UN Women as a forum through international forums to get support from the international community in the form of financial assistance and security. As an independent actor, UN Women in Afghanistan has three pillars and its own program. Although according to Clive Archer as an independent actor of unrestricted international organizations, in carrying out its program, UN Women continues to collaborate with local partners, the Ministry of Home Affairs and the Independent Election Commission.

Keywords: UN Women, Afghanistan, Women's Political Participation,

International Organizations

**PERAN *UNITED NATIONS WOMEN* DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PEMILU
PRESIDEN AFGHANISTAN TAHUN 2014**

Oleh

ANTONIUS YUDI KRISTIYANTO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **PERAN UNITED NATIONS WOMEN
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
PARTISIPASI PEREMPUAN PADA
PEMILU PRESIDEN AFGHANISTAN
TAHUN 2014**

Nama Mahasiswa

: **Antonius Yudi Kristiyanto**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1316071004

Jurusan

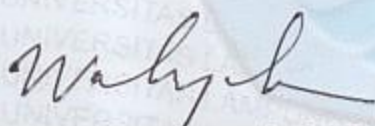
: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

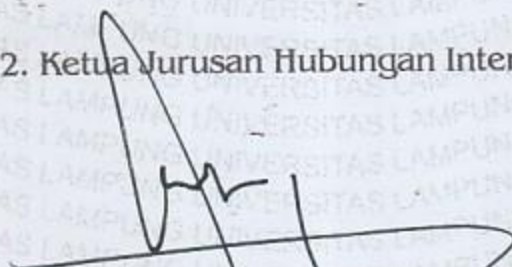


Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
NIP 19780328 200812 2 002



Gita Paramita Djausal, M.AB.
NIP 2315504841216201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

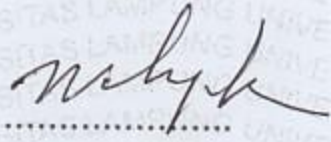


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

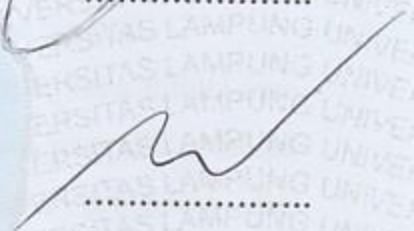
Ketua : **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Gita Paramita Djausal, M.AB.**



Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

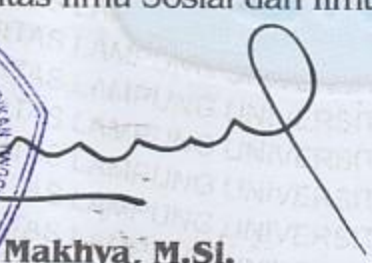


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.

NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan



Antonius Yudi Kristiyanto
NPM. 1316071004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Antonius Yudi Kristiyanto, dilahirkan di Metro pada tanggal 4 April 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Yohanes Abiyanto dan Ibu Maria Sri Hartati. Penulis menempuh pendidikan di Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius yang diselesaikan pada tahun 2001, melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SD Xaverius, Metro pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Xaverius, Metro yang diselesaikan pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 penulis menyelesaikan masa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Yos Sudarso, Metro.

Pada tahun 2013, penulis berhasil diterima di Universitas Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswa Hubungan Internasional melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa Hubungan Internasional, penulis pernah menjadi anggota UKM Katholik Universitas Lampung dan menjadi anggota dalam kepengurusan HMJ Hubungan Internasional periode 2015-2016 yaitu Departemen 5. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Padang Rindu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat pada bulan Januari 2016.

MOTTO

“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berpikir tanpa berencana untuk mewujudkannya.”

(Antonius Yudi Kristiyanto, 2018)

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.”

(Bobby Unser, 2014)

PERSEMBAHAN

**Atas Segala Kehendaknya dan Jalannya yang Telah membimbingku Selama
ini Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Untuk**

“Tuhan yang Maha Esa”

Yang selalu menyertai, membimbing dan menolongku dalam segala perkara.

“Orang Tuaku”

Sebagai wujud rasa terimakasihku yang telah memberi semangat dan motivasiku.
Semoga kalian bangga dengan gelar pertama yang aku dapatkan ini. Terimakasih
atas semua yang kalian telah berikan dalam hidupku sehingga pada kesempatan
ini aku mencoba memampukan diri untuk menyelesaikan karya sederhanaku ini.

“Almamaterku Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan karena di atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya membuat penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Peran *United Nations Women* dalam Mendukung Peningkatan Partisipasi Perempuan Pada Pemilu Presiden Afghanistan Tahun 2014” adalah salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan, motivasi, bantuan, semangat, dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional UNILA;
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terimakasih atas motivasi dan bimbingannya selama ini.
4. Ibu Dwi Wahyu Handayani, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional UNILA dan juga selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada ibu Dwi atas kesediaan waktu dan tenaganya

untuk memberikan saran, kritik, ilmu, serta bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Gita Paramita Djausal, M.AB, selaku pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada ibu Gita atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk memberikan saran, kritik, ilmu, dukungan serta juga bimbingan yang terbaik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku pembahas dosen dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada bu Ari atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk memberikan saran, kritik, ilmu, dukungan serta juga bimbingan yang terbaik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta staf administrasi di Jurusan Hubungan Internasional yang lain;
8. Keluargaku tercinta, ibu Maria Sri Hartati dan ayah Yohanes Abiyanto, yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Doa-doa yang diucapkan serta semangat yang kalian berikanlah yang menjadi sumber motivasi penulis.
9. Anggota ansos Makwid, Dani, Venty, Suprani dan Desi Tuvalu. Skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa dukungan dari kalian.
10. Anggota dari member rusun, Erika, Ana, Adi, Desi, Supran, Venty, Jajang dan Ayub
11. Ketiga anggota grup P2C, Dwi Putri Anggraini, Muhammad Suprani, dan Samuel Naingolan Elyasil. Terimakasih telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga

terimakasih atas kenangan dan *moment* selama kita bersama-sama. Bersama kalian saya mengenal arti drama kepancean.

12. Teman-teman terlambe SMP, Komeng, Agung, Tisa, Tiwi dan Hendrik.
13. Teman-teman kuliah satu jurusan penulis Bang Satria, Ziea, Banu, Rejak Serta mahasiswa/I Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2013 lainnya yang telah menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan;
14. Teman-teman HI dari angkatan 14, Tere, Rina, Andhika, Eka, Yuni, Eris dan Endani.
15. Teman-teman satu bimbingan mamah DJ, Samuel, Fika, Arum, Endani, Wilma dan Saka. Terima kasih untuk bantuan dan dukungannya;
16. Teman-teman KKN, Tria, Ria, Venny dan Panca. Terima kasih untuk dukungan dan bantuannya;
17. Teman-teman WWIR, Meta, Mail, Fathur, Izzy, Ais, Mia, Sherina, Anita, Nads, Bang Firman, Opi dan Fatika.
18. Dan juga terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan atas doa dan dukungannya untuk penulis dalam bentuk apapun. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2018

Penulis

Antonius Yudi Kristiyanto

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
COVER SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
SAN WACANA	
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Kerangka Teori	17
2.2.1. Feminisme Liberal	17
2.2.2. Peran Organisasi Internasional.....	21
2.2.3. Partisipasi Politik	24
2.3. Kerangka Pemikiran	25

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian.....	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4. Teknik Analisis Data	32

IV. UN WOMEN DAN AFGHANISTAN

4.1. UN Women	34
4.1.1. Sejarah Terbentuknya UN Women	34
4.1.2. UN Women dan Partisipasi Politik	38
4.1.3. UN Women di Afghanistan.....	42
4.2. Afghanistan	45
4.2.1. Provinsi di Afghanistan.....	45
4.2.2. Populasi	46
4.2.3. Pendidikan.....	47
4.2.4. Kondisi Politik Afghanistan.....	48
4.2.5. Hak-Hak Perempuan	51
4.2.6. Hak Perempuan Pada Pemilu Presiden Tahun 2014.....	57

V. PERAN UN WOMEN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN

5.1. Program UN Women di Afghanistan.....	60
5.1.1. Kontribusi <i>UN Women</i> di Afghanistan	62
5.2. Peran Organisasi Internasional di Afghanistan.....	69
5.2.1. <i>UN Women</i> sebagai Instrumen Politik Luar Negeri Afghanistan	70
5.2.2. <i>UN Women</i> sebagai Arena Penyelesaian Masalah	79
5.2.3. <i>UN Women</i> sebagai Aktor Independen	94
5.2.4. Analisis Penerapan Organisasi Internasional	96
5.3. Analisis Peningkatan Perempuan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Presiden Tahun 2014	99
5.3.1. Pandangan Perspektif Feminisme Liberal.....	103

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan	109
6.2. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pemilih untuk Pemilu 2004-2010 di Afghanistan	7
2. Data Perempuan Pengguna hak pilih Afghanistan tahun 2004-2010.	8
3. Laporan Kinerja UN Women dalam Mendukung Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan	40
4. Keterangan setiap provinsi di Afghanistan berdasarkan letak Ibukota	46
5. Peringkat dan pemerintah dalam mendukung partisipasi perempuan pada pemilu 2014.....	58
6. Peranan UN Women sebagai Organisasi Internasional.....	96
7. Data Perempuan Pengguna hak pilih Afghanistan tahun 2004-2014.	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	26
2. Peta Negara Afghanistan	44
3. Peran UN Women sebagai instrumen Afghanistan	71
4. Peran UN Women sebagai arena bagi Afghanistan.....	80

DAFTAR SINGKATAN

ACO	: <i>UN Women Afghanistan Country Office</i>
ANDS	: <i>Afghanistan National Development Strategy</i>
AWN	: <i>Afghan Women's Network</i>
BBC	: <i>British Broadcasting Corporation</i>
CAP	: <i>Coordination and Advocacy Pillar</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women</i>
DAW	: <i>Division for the Advancement of Women</i>
DUHAM	: <i>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia</i>
ECOSOC	: <i>United Nations Economic and Social Council</i>
EVAW	: <i>Elimination of Violence Against Women</i>
EVAWP	: <i>Eliminating Violence Against Women Pillar</i>
GBV	: <i>Gender Based Violence</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
IEC	: <i>Independent Election Commission</i>
INSTRAW	: <i>International Research and Training Institute for the Advancement of Women</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MOWA	: <i>Ministry of Women's Affairs</i>
NAPWA	: <i>National Action Plan for Women of Afghanistan</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OI	: <i>Organisasi Internasional</i>
OSAGI	: <i>Office of the special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PDPA	: <i>Partai Demokratik Rakyat Afghanistan</i>
PEEP	: <i>Political Economic Empowerment Pillar</i>
Pemilu	: <i>Pemilihan umum</i>
RCWP	: <i>Resource Centre for Women Parliamentarians</i>
UIS	: <i>UNESCO Institute for Statistics</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Development Fund for Women</i>

UN Women : *United Nations Women*
WHO : *World Health Organization*
WPP : *Women for Peace and Participation*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang telah melekat dan didapat manusia sejak mereka lahir. Dengan adanya HAM, maka mendorong penjaminan hak-hak manusia agar tidak dilanggar. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Mukadimah, HAM merupakan pengakuan martabat dalam diri seseorang akan hak-hak yang sama dan tidak tergantung dari diri manusia atas kebebasan, keadilan dan perlindungan.¹

Berdasarkan dari ciri-cirinya, ciri khusus hak asasi manusia dapat dijelaskan ke dalam empat macam.² Pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki karena hak tersebut telah ada semenjak manusia lahir. Kedua, hak asasi manusia tidak dapat dibagi karena semua manusia berhak memperoleh semua hak yang sama baik dalam sosial, ekonomi, sipil, budaya maupun politik. Ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut karena hak tersebut telah melekat sejak lahir dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Keempat, hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku di seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali. Dari cirinya ini, kita dapat melihat bahwa ada penggolongan pada jenis HAM. HAM menurut Deklarasi

¹DUHAM, 1948, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Diakses melalui <http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf>. pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 19:45 WIB.

² Fakih, M, 2003, *Menegakan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, Yogyakarta: Insist Press, Hal. 198

Universal Hak Asasi Manusia digolongkan menjadi 6 yaitu, hak asasi pribadi, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, hak asasi sosial budaya dan hak asasi dalam berpolitik.³

Hak untuk berpolitik menurut DUHAM dibagi menjadi empat yaitu hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.⁴ Jika melihat definisi dan ciri-ciri yang telah disampaikan di atas, maka hak untuk berpolitik antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, menyampaikan pendapat mengenai isu politik dan berpartisipasi dalam kegiatan politis lainnya.

Hal tersebut membuat pemberian hak politik yang sama bagi perempuan sangat penting karena dengan keterlibatan perempuan dalam bidang politik maka aspirasi perempuan dalam bidang politik akan terwakili dan keputusan yang diambil dalam bidang politik juga akan lebih merangkul perempuan.⁵ Dengan terjaminnya hak politik perempuan, maka perempuan dapat mengembangkan kemampuan ekonomi dan memiliki kehidupan yang terjamin. Sehingga penjaminan hak perempuan juga akan meningkat dan aspirasi mereka dapat tercapai.

³ *Op. Cit*

⁴ Kristiadi, J, 2009, *Wants To Be The Next President? A-Z Informasi Politik Dasar & Pemilu 2009*, Cet.1, Kanisius, Yogyakarta

⁵ Dewi, R, & Rostanty, 2004, *Jurnal Perempuan No.34: Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

Penjaminan HAM untuk mendapatkan hak yang sama bagi perempuan secara global ini telah diusahakan oleh *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) sejak tahun 1976. UNIFEM menyediakan bantuan-bantuan keuangan dan teknis untuk program-program inovatif dan strategi yang mempromosikan hak-hak asasi perempuan, partisipasi politik, keamanan serta ekonomi.⁶ UNIFEM melakukan program kerja berdasarkan keyakinan bahwa perempuan memiliki haknya untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan sehingga kesetaraan gender penting untuk mencapai pembangunan.

Pada tahun 2010, UNIFEM secara resmi digantikan oleh entitas barunya yaitu *United Nations Women* (UN Women).⁷ Organisasi internasional UN Women merupakan organisasi PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam menjamin HAM khususnya hak asasi perempuan, UN Women telah menjalankan tugasnya berdasarkan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) serta ketentuan norma global dari PBB.⁸ Penjaminan HAM bagi perempuan telah dilakukan oleh UN Women di 45 negara di dunia diantaranya 13 anggota dari Afrika, 11 dari Asia, 9 dari Amerika Latin dan Karibia, 8 dari Eropa Barat dan 4 dari Eropa Timur. Organisasi yang telah didirikan sejak tahun 2010 ini berisi penjaminan dan tercapainya hak perempuan atas ekonomi, pendidikan, kesehatan serta politik yang mulai diimplementasikan pada awal Januari tahun 2011.

⁶ UNIFEM, *Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM)*, Diakses melalui <http://orgs.tigweb.org/united-nations-development-fund-for-women-unifem> pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 15:30 WIB

⁷ Ayuningtias, S, 2016, *Peranan UN Women dalam Melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender*, Universitas Pasundan hal 44-47

⁸ UNWomen, *Result at a Glance*, Diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/about-us/results-at-a-glance/> pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 18:30 WIB

Dalam melihat bentuk usaha UN Women untuk menjamin hak perempuan di bidang politik, UN Women telah merealisasikannya di Afghanistan sebagai negara anggota UN Women yang ikut mendukung penjaminan hak perempuan di negaranya.⁹ Penjaminan hak perempuan di bidang politik tersebut terlihat dari salah satu bentuk ketiga pilar yang dibuat oleh UN Women di Afghanistan dalam upaya meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.¹⁰ Pilar yang berfokus terhadap penjaminan hak perempuan dalam politik tersebut, yaitu *Political Economic Empowerment Pillar (PEEP)*. Tujuan dibentuknya PEEP ini adalah untuk menutup kesenjangan keterlibatan perempuan dalam proses politik serta menciptakan peluang dan ketrampilan ekonomi yang memungkinkan perempuan menjadi *stronger voices* di komunitas mereka dan bangsa.

Pada masa pemerintahan Taliban tahun 1996-2001 penjaminan hak politik perempuan di Afghanistan tidak diberikan oleh Taliban dikarenakan bagi mereka tugas bagi seorang perempuan adalah bekerja di dapur tanpa harus terjun ke ranah politik.¹¹ Taliban merupakan gerakan Islam Sunni yang menerapkan Shariah Islam dengan versi mereka. Menurut laporan *freedomhouse* tahun 2001, sebelum Taliban jatuh Afghanistan memiliki hak politik dengan nilai yang terburuk yaitu angka tujuh.¹² Afghanistan merupakan negara yang penuh tantangan dan tidak

⁹ Gul, A, 2015, *Amnesty: Afghanistan Gagal Lindungi hak-hak Perempuan*, Diakses melalui <http://www.voaindonesia.com/a/amnesty-afghanistan-gagal-melindungi-hak-hak-perempuan/2709812.html> pada tanggal 17 Januari pukul 16:10 WIB

¹⁰ Tiga pilar UN Women terdiri dari *Elimination of Violence Against Women Pillar (EVAWP)*, *Political and Economic Empowerment Pillar (PEEP)* dan *Coordination and Advocacy Pillar (CAP)*. Sutton, J, 2015, *UN Women Afghanistan Development Results Narrative 2014-2017*. Hal 19

¹¹ Ma'ruf, Ali, 2005, *Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintah Taliban di Afghanistan Tahun 1996-2001*

¹² Hak politik tersebut diukur dengan penilaian angka (1=Terbaik, 7=Terburuk) dimana Afghanistan mendapatkan penilaian 7 dalam hak politik menurut laporan dari *Freedomhouse*. Freedomhouse, 2001, Hak Politik, Diakses melalui <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2001/afghanistan>. pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 19:00 WIB

aman bagi perempuan untuk hidup di sana terkait masih kentalnya budaya patriarki, aksi teroris, bertahannya stereotip dan praktek-praktek kepercayaan agama yang merugikan perempuan. Pemerintah Taliban juga berpendapat bahwa sudah selayaknya seorang perempuan haruslah tinggal dirumah dan hanya melayani seorang laki-laki menurut ajaran versi Islam mereka.¹³ Hal ini terbukti dengan dirampasnya hak-hak dasar yang dimiliki oleh perempuan seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mobilitas dan juga hak dalam menyuarakan pendapatnya di dalam politik.¹⁴

Perkembangan Afghanistan dalam menanggapi permasalahan partisipasi politik perempuan membaik pasca 2001 semenjak Amerika Serikat menyebarkan demokrasi di Afghanistan serta ditandatanganinya Konferensi Bonn.¹⁵ Dalam perjanjian tersebut menjelaskan pentingnya demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang ada di Afghanistan. Selanjutnya dalam Perjanjian Bonn tersebut, pemerintah Afghanistan berusaha untuk mendirikan pengadilan yang independen, konstitusi baru, pemilu yang bebas dan adil, serta perlindungan hak-hak minoritas termasuk perempuan.

Pada tahun 2002, Hamid Karzai selaku pemimpin sementara Afghanistan menandatangani *Declaration Of The Essential Rights Of Afghan Women*.¹⁶

Deklarasi ini menyatakan bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki hak

¹³*Ibid* hal.68

¹⁴ RAWA, *Beberapa pembatasan yang diberlakukan oleh Taliban pada perempuan di Afghanistan*, Diakses melalui <http://www.rawa.org/rules.htm> pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 19:30 WIB

¹⁵ Margesson, R, 2010, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan: Background and Policy Issues*, CRS Report for Congress, hal. 5

¹⁶Feminist, *Declaration Of The Essential Rights Of Afghan Women*, Diakses melalui www.feminist.org/afghan/declarationtext pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 08:30 WIB

yang sama dalam perlindungan hukum, kebebasan bermobilisasi, kebebasan berbicara dan berpartisipasi dalam politik. Hal tersebut tertuang pada *Declaration Of The Essential Rights Of Afghan Women* bagian III.

Pada tahun 2003, Afghanistan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan pembuatan peraturan maupun pernyataan tentang HAM yang tercantum dalam Konstitusi Loya Jirga tahun 2004.¹⁷ CEDAW dalam pengertiannya merupakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan antara hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Konstitusi Loya Jirga dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan gender di negaranya.

Terakhir, pada tahun 2009 Afghanistan membentuk hukum *Elimination of Violence Against Women* (EVAW).¹⁸ Hukum tersebut dibuat untuk menghilangkan kebiasaan maupun praktik-praktik yang dapat mendiskriminasi perempuan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan dibentuknya hukum EVAW ini secara tidak langsung membentuk aturan resmi dalam melindungi hak asasi perempuan di Afghanistan.

Dengan dibentuknya peraturan, hukum dan peratifikasian yang dilakukan oleh Afghanistan tersebut, hal ini telah mendukung penjaminan hak politik perempuan di negaranya. Jika dalam masa pemerintahan Taliban partisipasi perempuan tidak diperbolehkan, namun pasca 2001 perempuan dan laki-laki

¹⁷ Stiftung, HB, 2014, *Menilai Hak-Hak Perempuan di Afghanistan*, Hal.5.

¹⁸ National, BL & Authorities, N, 2009, *Afghanistan: Law of 2009 - Shiite Personal Status Law* Diakses melalui <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4a24ed5b2> pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 21:00 WIB

memiliki hak yang sama terutama dalam menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum.

Tabel 1.1: Jumlah pemilih untuk pemilu 2004-2010 di Afghanistan

Pemilu	Jumlah hak pemilih	Pegguna hak pilih		Tidak menggunakan hak pilih	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Presiden tahun 2004 ¹⁹	10.500.000	8.100.000	77	2.400.000	23
Parlemen dan Dewan Provinsi tahun 2005 ²⁰	12.800.000	6.400.000	50	6.400.000	50
Presiden dan Dewan Provinsi 2009 ²¹	15.600.000	4.800.000	31	10.800.000	69
Parlemen tahun 2010 ²²	16.800.000	4.200.000	25	12.600.000	75

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

Dilihat dari tabel di atas menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah hak pilih yang terdaftar di dalam pemilu. Dari tahun 2004 sampai dengan 2010 jumlah hak pilih meningkat sebanyak 6.300.000 orang dalam pemilu. Meski begitu, jika dilihat dari jumlah pengguna hak pilih dalam pemilu Afghanistan terus mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai dengan 2010. Hal ini dapat terlihat dari tabel yang menjelaskan bahwa dari tahun 2004 sampai 2010 jumlah pengguna hak pilih menurun sebesar 46 persen. Selain itu, di antara jumlah hak pilih yang terdaftar dengan pengguna hak pilih juga mengalami kesenjangan

¹⁹ NDI, 2010, *The 2010 Wolesi Jirga Elections in Afghanistan*, hal.104

²⁰ Loc.Cit

²¹ Loc.Cit

²² Loc.Cit

secara signifikan. Jika kita melihat jumlah hak pilih yang tidak digunakan pada pemilu 2004 sampai dengan 2010, terjadi peningkatan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari 2.400.000 di tahun 2004 sampai dengan 12.600.000 di tahun 2010.

Meski hak politik perempuan untuk mencapai kesetaraannya terhadap laki-laki telah diperjuangkan, persentase pengguna hak pilih perempuan tetaplah menurun semenjak dilaksanakannya pemilu dari tahun 2004 sampai pada tahun 2010. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi perempuan dalam memberikan hak pilihnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2: Data Perempuan Pengguna Hak Pilih Afghanistan tahun 2004-2010

Pemilu	Jumlah hak pemilih	Pengguna hak pilih		Tidak menggunakan hak pilih	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Presiden tahun 2004 ²³	4.305.000	2.701.000	63	1.604.000	37
Parlemen dan Dewan Provinsi tahun 2005 ²⁴	5.632.000	2.624.000	47	3.008.000	53
Presiden dan Dewan Provinsi 2009 ²⁵	5.929.000	2.301.000	39	3.627.000	61
Parlemen tahun 2010 ²⁶	6.720.000	1.638.000	24	5.082.000	76

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

²³ Jumlah hak pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2004 Diolah dari U.S Department of State, 2006, *U.S. Commitment to Women in Afghanistan*, Diakses melalui <https://2001-2009.state.gov/g/wi/rls/58651.htm> pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 18:30 WIB.

²⁴ Jumlah hak pemilih pada Pemilu Parlemen dan Dewan Provinsi tahun 2005 Diolah dari Gross, N, 2005, *Women's Guide to Winning in the 2005 Afghan Elections*, The Roqia Center for Women's Rights, hal.3.

²⁵ Jumlah hak pemilih pada Pemilu Presiden dan Dewan Provinsi tahun 2009 Diolah dari NATO, 2009, *15,6 Million Afghans are Registered to Vote*, Associated Press.2009/03/11

²⁶ Jumlah hak pemilih pada Pemilu Parlemen tahun 2010 Diolah dari Worden, S & Sudhakar, N, 2012, *Learning from Women's Success in the 2010 Afghan Elections*, the United States Institute of Peace, hal.1.

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa pengguna hak pilih perempuan mengalami penurunan setelah pemilu pertama. Jika dilihat dari pemilu tahun 2004 sampai dengan 2010, persentase pengguna hak pilih perempuan mengalami penurunan sebesar 39 persen. Selanjutnya, jika membandingkan jumlah hak pilih terdaftar dan juga pengguna hak pilih perempuan Afghanistan, kita dapat melihat jumlah dan persentase hak pilih yang tidak digunakan dalam pemilu Afghanistan. Seperti yang dijelaskan pada tabel bahwa hak pilih yang tidak digunakan oleh perempuan dalam pemilu mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2010. Jika dilihat dalam bentuk persentase maka peningkatan jumlah hak pilih yang tidak digunakan mencapai 39 persen.

Penurunan dalam data penggunaan hak pilih perempuan di Afghanistan tersebut disebabkan karena adanya ancaman serta pemberontakan pada saat hari pemilu berlangsung. Taliban juga bersumpah untuk mengganggu pemungutan suara dan melakukan serangkaian serangan jika pemilihan umum tetap diadakan.²⁷ Akibat dari adanya serangkaian bentuk ancaman dan tindakan dari para pemberontak serta dikombinasikan dengan ketakutan, tradisi, sikap apatis membuat perempuan Afghanistan tidak mau mengambil risiko pergi ke pemilu untuk menggunakan hak pilih mereka.

Dilihat dari permasalahan tersebut, bentuk penjaminan hak politik perempuan di Afghanistan berpuncak dengan bergabungnya Afghanistan menjadi anggota UN Women pada tahun 2010. UN Women sebagai pendukung feminisme liberal yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki peran dalam membantu mengatasi permasalahan perempuan yang

²⁷ BBC, 2014, Pemilu Afghanistan : Apa yang dipertaruhkan dalam pemilihan presiden Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-26747496> pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 15.30 WIB

dialami oleh negara anggotanya termasuk Afghanistan. Penurunan hak pilih perempuan di Afghanistan dari tahun 2004 hingga 2010 membuat UN Women sebagai organisasi internasional harus turut andil dalam membantu meningkatkan partisipasi perempuan di Afghanistan termasuk dalam meningkatkan hak pilih perempuan.

Pada tahun 2014, Afghanistan akan menyelenggarakan pemilu presiden untuk yang ketiga kalinya setelah melaksanakan pemilihan parlemen di tahun 2010. Sebagai organisasi pendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, UN Women tentunya memiliki peran dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan Afghanistan terutama dalam hak pilih pada pemilu presiden tahun 2014. Penurunan yang terjadi pada hak pilih perempuan dari tahun 2004 hingga 2010 membuat peneliti tertarik dalam membahas keterlibatan UN Women untuk mendukung peningkatan hak pilih perempuan pada pemilu presiden tahun 2014. Hal ini dikarenakan dalam menjamin hak perempuan termasuk dalam hak politik di Afghanistan, UN Women telah merealisasikannya dalam satu dari pilarnya di Afghanistan yaitu *Political Economic Empowerment Pillar* (PEEP). Melalui peran UN Women dan bentuk dukungan program dari pilarnya tersebut menjadi daya tarik penulis untuk meneliti peran yang dilakukan UN Women dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan Afghanistan pada Pemilihan Presiden tahun 2014.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan di atas terlihat bahwa partisipasi perempuan pasca pembentukan peraturan-peraturan, hukum dan

ratifikasi konvensi (sebelum UN Women) yang dilakukan oleh Afghanistan pada tahun 2001 telah membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2004-2010. Namun pada tahun 2004 sampai dengan 2010, tingkat pengguna hak pilih perempuan mengalami penurunan dalam pemilu. Pada tahun 2010, Afghanistan bergabung dengan UN Women. UN Women sebagai badan PBB serta pendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki peran untuk mendukung dan meningkatkan hak politik perempuan di Afghanistan sebagai negara anggotanya. Pada tahun 2014, Afghanistan akan menyelenggarakan pemilihan presiden yang dimana pada pemilu sebelumnya tingkat partisipasi perempuan dalam hak pilih terus mengalami penurunan. Melalui peran dan salah satu pilarnya yakni PEEP, peneliti ingin menjelaskan dukungan yang akan diberikan UN Women dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada pemilu presiden tahun 2014

Sehingga penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: “Bagaimana peran *UN Women* dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada pemilu presiden Afghanistan tahun 2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori dalam Hubungan Internasional menggunakan konsep dan teori feminisme liberal, peran organisasi internasional dan partisipasi politik pada fenomena peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu.

1.4.1.2 Untuk mengetahui peran organisasi internasional dalam meningkatkan hak pilih perempuan.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai literatur tambahan dalam mempelajari organisasi internasional yang berfokus terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.

1.4.2.2 Diharapkan memberikan saran dan rekomendasi bagi relasi antara organisasi internasional dan negara

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjelaskan peran yang dilakukan UN Women dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada pemilu presiden di Afghanistan tahun 2014 terutama dalam meningkatkan hak pilih perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema sama.

Pertama, Buku karangan Tim Redaksi Hotcopy yang berjudul *Perang Afghanistan di Balik Perseteruan AS vs Taliban*. Buku ini menceritakan tentang pertempuran Amerika Serikat dalam menggulingkan kekuasaan Taliban serta bagaimana Amerika Serikat menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM di Afghanistan.²⁸ Dalam buku karangan Tim Redaksi Hotcopy tersebut dapat membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana kehidupan perempuan setelah masuknya demokrasi di Afghanistan dilihat dari hak-hak perempuan dalam partisipasi pemilu.

Kedua, penelitian yang berjudul *Peran UN Women dalam penyetaraan gender di Afghanistan*. Catarina Mega Amelia, mahasiswi Universitas Mulawarman dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan di Afghanistan telah menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, sosial, politik, hukum, akses

²⁸ Redaksi, T, 2002, *Perang Afghanistan di Balik Perseteruan AS vs Taliban*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

kesehatan maupun ekonomi. Penyebab diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan di Afghanistan ini meliputi kemiskinan, budaya, agama dan hukum yang tidak memihak kepada perempuan. Sehingga pada tahun 2010 UN Women terbentuk untuk melanjutkan upaya kesetaraan gender di Afghanistan yang sebelumnya telah dilakukan oleh UNIFEM. Upaya-upaya tersebut meliputi bidang ekonomi, politik dan pendidikan.²⁹

Dari penjelasan di atas, penelitian ini mencoba menjelaskan kinerja organisasi internasional UN Women dalam penyetaraan gender di Afghanistan. Akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus terhadap bidang politik terutama dalam melihat partisipasi politik perempuan di dalam pemilu. Sedangkan penelitian terdahulu yang dibuat oleh Catarina Mega Amelia hanya menjelaskan upaya UN Women secara general yang meliputi bidang ekonomi, politik serta pendidikan dalam membahas upaya UN Women dalam penyetaraan gender di Afghanistan.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Peranan UN Women dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Timor Leste* yang dilakukan oleh Zelia dagra maia yama, mahasiswa Universitas Pasundan. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai peranan UN Women di Timor Leste dalam menjalankan program-programnya untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dalam bidang politik. Penelitian tersebut juga menjelaskan kendala UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Timor Leste.³⁰

²⁹ Amelia, CM, 2016, *Upaya UN Women dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan*, Vol 4 hal 89-102

³⁰ Yama, ZDM, 2014, *Peranan UN Women dalam Meningkatkan Politik Perempuan di Timor Leste*, Universitas Pasundan

Dari penelitian yang dilakukan oleh Zelia Dagraca Maia Yama, dapat membantu penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan UN Women dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam membahas UN Women dan konsep peranan organisasi internasional untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Selain itu, penelitian ini juga lebih memfokuskan partisipasi politik perempuan ke dalam penggunaan hak pilihnya di pemilu presiden Afghanistan tahun 2014.

Keempat, penelitian yang berjudul *Peranan UN Women dalam Melindungi Hak- Hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender* yang dilakukan oleh Suci ayuningtiyas, mahasiswi Universitas Pasundan. Dalam penelitiannya, peneliti tersebut membahas mengenai perempuan yang kerap menjadi korban dan mengalami dampak buruk yang berkepanjangan dari konflik yang terjadi di suatu negara. Selain itu dijelaskan bahwa UN Women sebagai organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hak kaum perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, keamanan serta budaya di Somalia.³¹

Dari penelitian yang dilakukan oleh Suci Ayuningtiyas, dapat membantu penelitian ini untuk menjelaskan bahwa perempuan di Afghanistan masih mendapatkan bentuk ancaman yang dilakukan oleh Taliban pada saat pemilu presiden tahun 2014 meskipun rezim pemerintahan Taliban telah runtuh. Hal ini dikarenakan konflik yang berkepanjangan dalam perbedaan ideologi antara kelompok Taliban dengan pemerintah Afghanistan dalam memandang demokrasi.

³¹ Ayuningtiyas, S, 2016, *Peranan UN Women dalam Melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender*, Universitas Pasundan

Selain itu dengan adanya UN Women di Afghanistan sebagai organisasi internasional yang berkontribusi dalam melindungi hak-hak serta pemberdayaan perempuan, dapat membantu penelitian ini dalam melihat kinerja hasil UN Women khususnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan di pemilu.

Kelima, penelitian yang berjudul *Pengaruh Gerakan Feminist Liberal Terhadap Gerakan Perempuan Indonesia, Sebuah Studi Pada Relasi Organisasi Perempuan Internasional dengan Organisasi Perempuan Indonesia (Rifka Annisa, Women Crisis Center) dalam Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan Indonesia* yang dilakukan oleh Atika Candra Larasati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang.³²

Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai salah satu kemajuan organisasi perempuan Indonesia saat ini merupakan salah satu bagian dari kesuksesan bantuan organisasi internasional. Bantuan yang diberikan adalah berupa dana hibah atau *funding* untuk membiayai operasional atau kegiatan organisasi perempuan Indonesia. Rifka Annisa merupakan salah satu organisasi perempuan Indonesia yang mendapatkan bantuan dari salah satu organisasi Internasional yaitu *Global Fun For Women*. Tujuan dari organisasi pemberi hibah yang bersifat liberal ini tidak hanya memberikan bantuan kepada organisasi lokal saja melainkan juga bertujuan untuk mempengaruhi sifat liberal atau “feminis liberal” yang mereka gunakan agar di adopsi di organisasi lokal. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah menjadikan organisasi lokal jauh lebih baik dan sama seperti organisasi pemberi hibah. Dengan adanya bantuan dari lembaga

³² Larasati, AC, 2012, *Pengaruh Gerakan Feminist Liberal Terhadap Gerakan Perempuan Indonesia, Sebuah Studi Pada Relasi Organisasi Perempuan Internasional dengan Organisasi Perempuan Indonesia (Rifka Annisa, Women Crisis Center) dalam Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang

internasional tersebut sangat membantu kegiatan yang dilakukan oleh Rifka Annisa untuk menjadikan perempuan Indonesia mandiri dalam hal perekonomian.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Atika Candra Larasati, dapat membantu penelitian ini untuk menjelaskan perkembangan feminisme liberal yang ditandai dengan lahirnya organisasi dalam menyuarakan hak-hak perempuan seperti halnya *Global Fun For Women* dan Rifka Annisa. Lahirnya organisasi internasional seperti halnya UN Women sebagai salah satu pendukung dari gerakan feminisme liberal, membantu penelitian ini dalam menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan UN Women untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu di Afghanistan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan perspektif feminisme yang berkembang dari pemikiran liberalisme dan bertumpu pada kebebasan serta kesetaraan rasionalitas.³³ Dasar dari perjuangan feminisme liberal adalah untuk mendapatkan persamaan, kesetaraan akan hak dan kesempatan bagi setiap individu karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dan keduanya adalah sama.

Feminisme liberal menjelaskan bahwa keamanan global tidak akan dapat tercapai jika tidak ada pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang terutama bagi kaum perempuan. Akar pemikiran dari feminisme liberal muncul dari pandangan perempuan yang seolah kebebasannya

³³ Tong, RP, 1999, *Feminist Thought*. Yogyakarta. hal. 15.

untuk menentukan hidup dikekang. Para pendukung feminisme liberal menyadari bahwa kaum pria lebih mendominasi suatu negara sehingga segala kebijakan yang ada sangat dipengaruhi oleh kaum pria.³⁴ Menurut feminisme liberal, perempuan adalah makhluk *inferior* yang hanya ada dan diam dalam suatu negara sebagai warga negara tanpa memiliki peran yang berpengaruh dalam pemerintahan maupun pembuat kebijakan.

Para feminisme liberal melakukan usaha dalam memperjuangkan dan menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah golongan tertindas dan haruslah mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Feminisme Liberal percaya bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulatif (terkait dengan peraturan hukum), yang membedakan hak laki-laki dan perempuan.

Dalam perkembangannya, Feminisme liberal dibagi kedalam 3 tahap yaitu:

1. Perkembangan feminisme pada abad 18

Pada abad 18 gerakan feminisme liberal menyuarakan pendidikan yang sama untuk perempuan. Karena lahirnya gerakan feminisme liberal ini berawal dari anggapan nalar laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang berbeda maka kaum feminisme liberal mengusung pendidikan sebagai jalan untuk menyetarakan kemampuan nalar laki-laki dengan perempuan, selain itu melalui pendidikan juga perempuan dapat menyetarakan posisinya dimasyarakat agar tidak dipandang sebelah mata dan ditindas lagi. Dari hal tersebut maka feminisme liberal menyuarakan jalan keluar sebuah pendidikan yang setara dengan laki-laki

³⁴ *Ibid*

dengan cara mengajarkan hal-hal yang rasionalitas sehingga perempuan juga dapat menjadi makhluk yang mandiri.³⁵

2. Perkembangan feminisme liberal pada abad 19

Pada abad ini kaum feminisme liberal menyuarkan hak-hak sipil serta kesempatan perempuan untuk bekerja di luar rumah demi menunjang kehidupannya. Kaum feminisme liberal memiliki pendapat bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan sehingga kesempatan ekonomi haruslah diberikan kepada perempuan agar kesetaraan dapat dicapai. Kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak-hak sipil bagi perempuan diantara hak untuk berorganisasi, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan hak milik pribadi.³⁶

3. Perkembangan feminisme liberal abad 20

Pada abad ini perkembangan feminisme liberal ditandai dengan lahirnya gerakan atau organisasi yang menyuarkan hak-hak perempuan, seperti halnya dengan UNIFEM.³⁷ Organisasi ini juga tidak lain bertujuan menyetarakan agar perempuan dapat memiliki hak, kesempatan pendidikan dan ekonomi yang sama untuk dapat setara dengan laki-laki.

Menurut pandangan feminis liberal, agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu feminisme liberal lebih memfokuskan perjuangan mereka pada perubahan segala undang-undang dan hukum,

³⁵ Tong, RP, 2006 *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta:Jalasutra. Hal.15-48

³⁶ Latifah, 2014, *Kontruksi Peran Sosial Perempuan dalam Rubrik Liputan Khas Sukses di Mata Kami pada Majalah Femina*. Hal.30

³⁷ *Loc. Cit*

meningkatkan hak perempuan dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara perempuan dan laki-laki serta mengusulkan peningkatan pendidikan dan moral.³⁸

Dalam mengusung kesetaraan di Afghanistan, gerakan dari feminisme liberal ini sangat dibutuhkan dalam mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di negara tersebut. Meskipun rezim Taliban telah jatuh, perempuan masih mengalami bentuk diskriminasi dalam setiap bidang termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kebebasan dari kekerasan, persamaan di depan hukum, dan partisipasi politik.³⁹

Sehingga pada tahun 2002, Afghanistan bergabung dalam keanggotaan UNIFEM untuk mendukung hak-hak perempuan di negaranya. Keterlibatan yang dilakukan UNIFEM di Afghanistan yaitu mendukung pengembangan, pemantauan dan implementasi kebijakan yang melindungi dan mempromosikan hak perempuan. Hal yang dimaksud tersebut meliputi pengembangan *National Action Plan for Women of Afghanistan* (NAPWA), penerapan kuota dalam konstitusi nasional, undang-undang dan kebijakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat nasional dan lokal dan mengarusutamakan gender dalam *Afghanistan National Development Strategy* (ANDS).⁴⁰

Pada tahun 2010 UNIFEM digantikan oleh UN Women sebagai organisasi pendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam pergantian

³⁸ Megawangi, R, 1999, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka hal. 120

³⁹ HRW, 2009, *We Have the Promises of the World*, Diakses melalui <https://www.hrw.org/report/2009/12/06/we-have-promises-world/womens-rights-afghanistan> pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 14:30 WIB

⁴⁰ UN Women, 2010, *UN Women Engagement in Afghanistan*, Diakses melalui <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/1/un-women-engagement-in-afghanistan> pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 15:30 WIB

tersebut, Afghanistan sebagai negara yang masih mengalami kendala dalam penerapan CEDAW untuk mendukung kesetaraan perempuan pun memutuskan untuk bergabung dengan UN Women guna menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negaranya.⁴¹ Dengan menjadikan Afghanistan sebagai negara anggotanya, UN Women membentuk tiga pilar di Afghanistan sebagai bentuk dukungannya terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan yang ada di Afghanistan.

Sehingga perkembangan feminisme liberal di Afghanistan dapat dijelaskan melalui organisasi internasional UNIFEM maupun UN Women dalam menyuarakan hak-hak perempuan baik dalam kesetaraan maupun untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Peran UN Women dalam melakukan kinerjanya untuk memajukan hak asasi perempuan adalah dengan memberikan dukungan kepada Pemerintah dan masyarakat sipil dalam penerapan CEDAW di Afghanistan. Tidak hanya itu saja, UN Women juga bekerja sama dengan organisasi/ LSM lokal, memfasilitasi dan mendukung konstitusi, hukum serta kebijakan pemerintah dalam mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di negaranya.⁴²

2.2.2 Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional (OI) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat internasional atas dasar kesamaan tujuan dalam menciptakan

⁴¹ UN Women, 2013, *In Afghanistan, women and girls strive to get an education*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/afghani-women-strive-to-get-an-education> pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 15:50 WIB

⁴² UN Women, 2012, *Human Rights: UN Women Strategy*, Diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/focus-areas/humanrights/un-women-strategy/>, pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16:45 WIB

perdamaian dunia dalam hubungan internasional. Organisasi internasional menurut Clive Archer didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan antara anggota-anggota baik pemerintah maupun non pemerintah dari tiga atau lebih negara yang berdaulat.⁴³ Tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan organisasi internasional ini adalah mengejar kepentingan bersama para anggotanya tanpa melanggar kedaulatan dan kekuasaan negara anggotanya. Sehingga organisasi internasional bagi negara-negara dianggap sangat penting bagi kelangsungan hubungan antarnegara ataupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam buku karangan Clive Archer yang berjudul *International Organization* menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:⁴⁴

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. OI digunakan oleh anggota-anggotanya dalam tujuan tertentu dan biasanya terjadi pada IGO (*Intergovernmental Organization*). Peranan OI sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. Menurut Clive Archer juga, sebagai instrumen OI digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai intensitas konflik dan juga menyelaraskan tindakan. Dengan menyelaraskan tindakan sesuai OI maka suatu negara telah menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa kinerjanya sesuai dengan OI yang berlandaskan atas kesamaan tujuan. Dalam mencapai tujuan politik luar

⁴³Archer, C, 1983, *International Organization*, London: Allen & Unwin Ltd. Hal.35

⁴⁴*Ibid*, hal.137-147

negeri suatu negara, organisasi penting bagi kepentingan suatu negara dalam mendukung keuntungan jangka panjang bagi pemerintah nasional.⁴⁵

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Berdasarkan peran OI sebagai arena atau forum, organisasi internasional menyediakan wadah bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional digunakan oleh suatu negara sebagai tempat berkonsultasi maupun memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional.⁴⁶
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sedangkan dalam peran OI sebagai aktor independen, keindependenan diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi. Dalam hal ini, organisasi internasional melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan program yang mereka bentuk tanpa dipengaruhi dari kepentingan luar organisasi.

⁴⁵ *Ibid*, hal.130-131

⁴⁶ *Ibid*, hal.136

2.2.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara-negara demokrasi. Dalam suatu pengambilan keputusan, tanpa adanya partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum serta menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan. Melalui keterlibatan partisipasi politik masyarakat, dapat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik di negaranya. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.⁴⁷

Dalam melihat bentuk-bentuk partisipasi politik, Meriam Budiardjo menjelaskannya kedalam dua bentuk yaitu partisipasi politik yang bersifat aktif dan partisipasi politik yang bersifat pasif. Bentuk sederhana dalam menjelaskan partisipasi aktif ini adalah dengan memberikan hak suara dalam pemilu serta turut serta dalam demonstrasi. Sedangkan bentuk partisipasi pasif bisa dikategorikan dalam diskusi politik informal yang dilakukan oleh individu-individu bersama seseorang untuk membahas permasalahan politik yang terjadi.⁴⁸

⁴⁷ Budiardjo, M, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia.

⁴⁸ Budiardjo, M, 1982, *Partisipasi dan Partai politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : PT.Gramedia, hal. 10

Partisipasi politik dalam pelaksanaannya merupakan suatu aktivitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh kesadaran politik.⁴⁹ Kesadaran politik yang dimaksud adalah kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang sebagai warga Negara. Melalui peningkatan kesadaran politik maka tingkat partisipasi politik terkait pemilu akan dapat meningkat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam membuat kerangka pemikiran, peneliti akan mencoba menjelaskan permasalahan penelitian mengenai peran yang dilakukan oleh UN Women dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan Afghanistan pada pemilu presiden di tahun 2014. Hal ini dikarenakan pada pemilu sebelumnya, partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu mengalami penurunan dari tahun 2004. Permasalahan yang diteliti akan digabungkan dengan teori dan konsep untuk menjelaskan penelitian ini.

Dalam menjelaskan peran UN Women dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Afghanistan, UN Women memiliki pilarnya sendiri yaitu PEEP beserta programnya dalam mendukung partisipasi politik di Afghanistan terkait peningkatan partisipasi perempuan di Afghanistan. Terdapat tiga hal utama yang dilakukan oleh UN Women dalam mendukung partisipasi politik di Afghanistan terkait peningkatan pengguna hak pilih perempuan yaitu melalui bantuan dana, perlindungan hukum dan bekerjasama dengan mitra lokal untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Afghanistan. Sebagai organisasi internasional, UN

⁴⁹ Surbakti, M, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

Women memiliki perannya sendiri dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam menjelaskan peran UN Women tersebut, peneliti menggunakan teori dari Clive Archer yang menjelaskan bahwa peran organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan aktor independen.

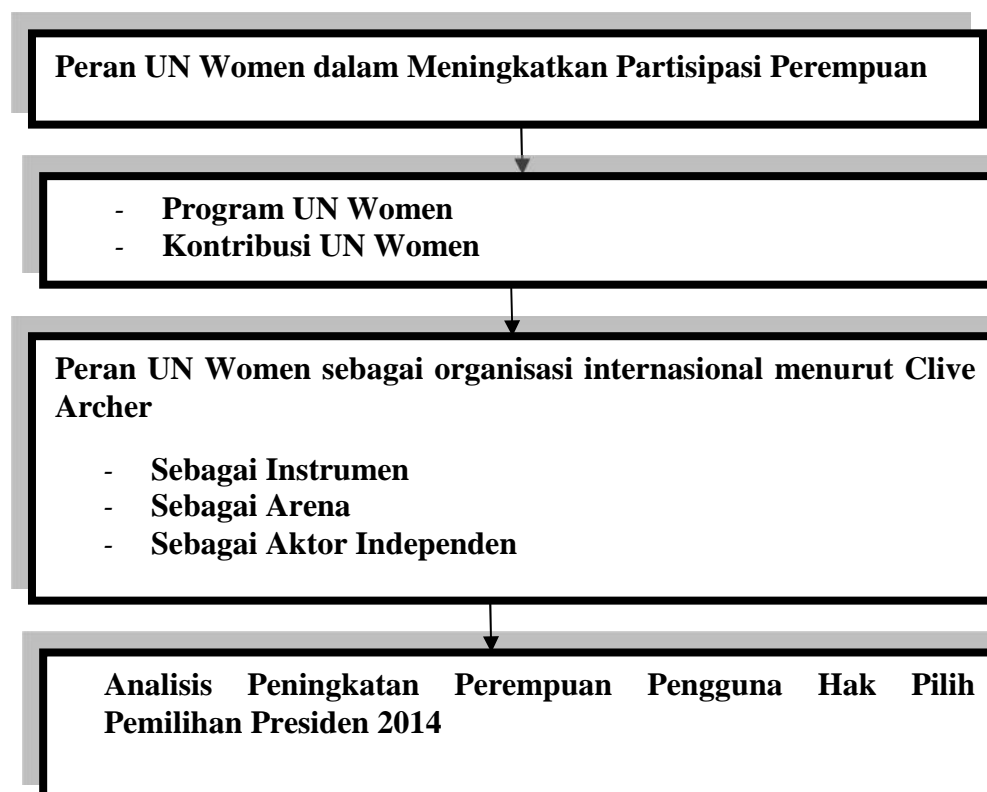
Berdasarkan perannya sebagai instrumen, peneliti akan menjelaskan bahwa UN Women digunakan Afghanistan dalam menjalankan tujuan politik luar negerinya sesuai dengan konstitusi di negaranya. Dengan menggunakan UN Women sebagai instrumen, Afghanistan menjalankan tujuan politik luar negerinya yaitu mendukung kemerdekaan manusia terkait HAM dan juga mendukung kesejahteraan rakyatnya. Jika Afghanistan menjalankan tujuan politik luar negerinya maka Afghanistan dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negaranya ikut mendukung HAM sehingga semua negara ikut mendukung kemajuan HAM yang terjadi di Afghanistan.

Sebagai arena, peneliti akan menjelaskan bahwa UN Women digunakan oleh Afghanistan sebagai wadah dalam menyampaikan permasalahan dan mencari dukungan di forum-forum internasional. Hal ini bertujuan agar komunitas internasional dapat membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negaranya dalam mendukung kemajuan HAM di negaranya. Dalam forum internasional, dukungan tersebut berupa kebijakan dan komitmen dari komunitas internasional dalam mendukung hak-hak perempuan di Afghanistan.

Berdasarkan aktor independen, peneliti menjelaskan tentang keindependenan UN Women di Afghanistan dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan. Dalam menunjukkan keindependennya tersebut, UN

Women memiliki pilar dan programnya sendiri dalam mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. UN Women juga memiliki landasan hukumnya sendiri dalam melaksanakan kinerjanya untuk mendukung hak perempuan di Afghanistan dalam menjalankan perannya sebagai aktor independen tanpa dipengaruhi dari luar organisasi.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini bahwa peran UN Women tersebut mendukung terjadinya peningkatan pengguna hak pilih perempuan pada pemilu presiden tahun 2014. Berdasarkan pandangan dari feminisme liberal juga, UN Women telah melakukan kinerjanya untuk meningkatkan kesetaraan dalam mendukung hak perempuan dalam bidang politik dengan membuat kerangka perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan serta perempuan secara efektif berpartisipasi dalam mempengaruhi pemilu tahun 2014. Sehingga dalam menjelaskannya dibentuklah bagan kerangka pemikiran seperti berikut :



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat ditujukan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku. Jenis penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, serta menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang membutuhkan ketajaman dalam menganalisis suatu masalah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁰ Penelitian kualitatif ini sendiri mengarah terhadap paradigma penelitian terutama yang berkepentingan dengan makna dan penafsiran.⁵¹

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menampilkan data-data yang menggambarkan suatu masalah, gejala, fakta dan peristiwa yang akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan pengaruh terhadap suatu kondisi⁵². Sehingga

⁵⁰Moleong, LJ, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung , hal. 9

⁵¹Stokes, J , 2003. *How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Kajian Media dan Budaya*. Bentang Pustaka: Yogyakarta. hal. 9

⁵²Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung., hal. 243.

dalam penelitian kualitatif akan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, persepsi yang disajikan dengan bentuk kata-kata ataupun bahasa. Dalam penelitian ini tipe analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran UN Women dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada pemilu presiden di Afghanistan Tahun 2014.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukannya batasan-batasan agar dapat menghindari keluarnya bahasan dari topik permasalahan atau hilangnya fokus penelitian sehingga penelitian menjadi tidak konsisten. Hal itu ditujukan agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang telah dihimpun. Fokus penelitian ini akan membantu peneliti memilih data-data yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Fokus penelitian juga memudahkan peneliti karena selain memberikan pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan, juga memberikan garis besar pengamatan penelitian sehingga observasi dan analisa hasil penelitian yang didapat akan terarah.

Peneliti memfokuskan penelitian ini mengenai peran UN Women dalam mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan di Afghanistan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden 2014. Peran OI yang peneliti pakai menggunakan teori dari Clive Archer yang menjelaskan peran OI dibagi menjadi tiga yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan aktor independen.

Berdasarkan peran OI sebagai instrumen, peneliti akan jelaskan bahwa UN Women digunakan sebagai alat maupun sarana Afghanistan dalam mencapai tujuan politik luar negerinya serta menyalurkan tindakan guna mendukung HAM. Melalui peran UN Women tersebut, peneliti ingin menjelaskan hasil yang dicapai Afghanistan dalam menjalankan tujuan politik luar negerinya dengan menjadikan UN Women sebagai instrumennya.

Berdasarkan perannya sebagai arena, peneliti ingin menjelaskan bahwa UN Women digunakan oleh Afghanistan agar dapat mendapat perhatian dunia internasional mengenai permasalahan dukungan terhadap hak perempuan di negaranya. Agar dapat mendukung hak perempuan di Afghanistan, UN Women digunakan sebagai wadah untuk membangun komitmen bagi komunitas internasional yang hadir dalam forum internasional untuk mendukung kemajuan hak perempuan di negaranya.

Sebagai aktor independen, peneliti ingin menjelaskan bahwa UN Women dalam keindependennya memiliki pilar, program dan landasan hukum dalam melaksanakan kinerjanya di Afghanistan. Melalui ketiga peran tersebut, peneliti akan menjelaskan bahwa peran yang dilakukan UN Women tersebut ikut mendukung terjadinya peningkatan partisipasi perempuan dalam hak pilih yang terjadi di Afghanistan. Dalam perspektif feminisme liberal juga akan peneliti jelaskan bahwa UN Women menjalankan kinerjanya dalam kesetaraan gender melalui dasar hukum yang kuat serta peningkatan kesetaraan gender sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung peningkatan hak pilih perempuan pada pemilu presiden tahun 2014.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian, hal ini dikarenakan tujuan utama sebuah penelitian diadakan adalah untuk mengumpulkan data. Sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁵³ Dalam mengumpulkan data terdapat dua bentuk sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan juga data sekunder sebagai sumber data.

Data primer yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari buku dan dokumen resmi yang diunduh peneliti melalui website seperti Komisi Pemilihan Independen Afghanistan dan UN Women. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini peneliti peroleh dari jurnal, website resmi serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Untuk informasi tambahan lain peneliti memperolehnya dari situs-situs berita online untuk mendukung penelitian ini. Isi berita tersebut berkaitan dengan permasalahan partisipasi politik perempuan Afghanistan serta peran UN Women mengatasi permasalahan tersebut. Data-data tersebut kemudian peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁵³ Nizarr, M, 2016, *Metedologi Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi*. Universitas Lampung

⁵⁴ Sugiyono, 2012, *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk melakukan penelitian karena dengan menggunakan teknik analisis data, peneliti akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori yang kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁵ Maka analisis data merupakan pengumpulan data yang disusun secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipresentasikan kepada orang lain.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu berdasarkan pada data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi asumsi. Peneliti akan melihat fakta empiris dan mempelajari fenomena yang terjadi. Dalam hal ini prosedur penelitian dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian. Adapun langkah-langkah dari proses analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu⁵⁶ :

3.4.1 Reduksi Data

Tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data. Proses reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, pencarian tema dan pola serta membuang yang tidak perlu.⁵⁷ Dengan

⁵⁵ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, hal. 244

⁵⁶ Huberman, M, 1994. *Qualitative Data Analysis*. Dalam Sugiyono 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung. hal. 246

⁵⁷ *Ibid.* hal. 338

melakukan reduksi data, peneliti akan lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data karena dengan melakukan proses tersebut akan membantu pengorganisasian terhadap data-data sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan.

3.4.2 Penyajian Data

Langkah kedua yaitu penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penyajian data yang berupa uraian teks yang bersifat naratif.

3.4.3 Kesimpulan / Verifikasi

Langkah terakhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif yaitu pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti perlu mencari adanya pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan hipotesis sehingga data tersebut dapat diambil kesimpulan. Setelah itu peneliti melakukan uji kebenaran atau verifikasi terhadap penelitian yang dilakukan berdasarkan pada proses reduksi data dan penyajian data.

IV. UN WOMEN DAN AFGHANISTAN

4.1. UN Women

4.1.1. Sejarah Terbentuknya UN Women

UN Women merupakan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk untuk mendukung perempuan secara global pada tanggal 2 Juli 2010, UN Women pun terbentuk atas kesepakatan dari Majelis Umum PBB serta sebagai bagian dari agenda reformasi PBB. Dalam kepemimpinannya, Pemimpin UN Women yang pertama diketuai oleh mantan Presiden Chile yaitu Michelle Bachelet sebagai Direktur Eksekutif perdana dan digantikan oleh mantan wakil presiden Afrika Selatan pada tanggal 10 Juli 2013 yaitu Phumzile Mlambo-Ngcuka sebagai Direktur Eksekutif hingga saat ini.⁵⁸ UN Women merupakan penggabungan empat bagian pekerjaan penting PBB yang berbeda dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Empat bagian dari sistem PBB, yaitu :⁵⁹

1. Divisi untuk Pemajuan Perempuan atau *Division for the Advancement of Women* (DAW).

⁵⁸ UN Women, 2013, *Phumzile Mlambo-Ngcuka from South Africa appointed as new UN Women Executive Director*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/phumzile-mlambo-ngcuka-appointed-as-new-un-women-executive-director> pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 16:00 WIB

⁵⁹ UN Women, *About UN Women*, diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> Pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 16:15 WIB

2. Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW).
3. Kantor Penasihat Khusus Isu Gender dan Kemajuan Wanita atau *Office of the special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* (OSAGI).
4. Dana Pembangunan PBB untuk perempuan atau *United Nations Development Fun for Women* (UNIFEM).

Berdasarkan pengintegrasian dari keempat bagian dari sistem PBB menjadi entitas baru yaitu UN Women, hal ini menjadi suatu pengambilan langkah maju bagi perkembangan perempuan di dunia dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Melalui UN Women, PBB menjalankan perannya dalam meningkatkan upaya-upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia. Ketika seorang perempuan mendapatkan kesetaraan seperti halnya HAM, kepentingan sosial, ekonomi serta mendapatkan pendidikan dan pemberdayaan, maka kehidupan mereka akan lebih produktif di masyarakat. UN Women dibentuk oleh PBB tidak lain memiliki tujuan untuk meningkatkan, dan bukan menggantikan upaya yang dilakukan oleh bagian lain dari sistem PBB seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Development Programme* (UNDP), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA), yang semuanya akan terus bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang keahlian mereka.⁶⁰

⁶⁰ UN Women Asia and The Pacific, *Frequently Asked Questions*, Diakses melalui <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/fiji/faq> pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 17:00 WIB

Untuk dapat mencapai tujuannya, UN Women menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yaitu *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). ECOSOC merupakan kovenan HAM yang memuat penegasan hak-hak dasar budaya, sosial dan ekonomi setiap manusia.⁶¹ Hak-hak dasar yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk mencapai taraf kesehatan yang tinggi, hak atas pemukiman dan hak untuk memperoleh pendidikan. Maka dari itu, peran utama yang harus dilakukan oleh UN Women sebagai badan khusus dibawah Dewan Ekonomi dan sosial PBB dalam mencapai tujuannya adalah :⁶²

1. Mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau *Commission on the Status of Women* dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.
2. Membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang sudah disepakati, siap untuk memberikan dukungan teknis maupun keuangan yang sesuai bagi negara-negara yang memintanya, serta menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
3. Memimpin dan mengkoordinasikan kerja sama sistem PBB dengan negara-negara anggota mengenai kesetaraan gender, serta mempromosikan akuntabilitas termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan.

Dalam melihat perkembangan UN Women semenjak tahun 2010, UN Women telah berkembang sebagai lembaga besar dalam mengatasi kesetaraan dan

⁶¹ Piagam PBB, *Isi Pasal 68 Piagam PBB: "shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights "*

⁶²UN Women, *About UN Women, Loc.cit*

pemberdayaan perempuan di negara-negara anggotanya. Dukungan yang dilakukan UN Women sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesetaraan dan pemberdayaan perempuan yaitu membuat pemerintah melakukan komitmen politik untuk mendukung kesetaraan gender, melakukan kegiatan advokasi dan komunikasi, membuat pusat pelatihan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta agenda hak-hak perempuan. Program yang telah dijalankan UN Women telah berjalan di 90 negara anggotanya yang diperkuat dan di dorong dalam undang-undang, kebijakan, tindakan serta kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta yang terkait.⁶³

Dalam memajukan kesetaraan gender, UN Women memiliki prioritas dalam meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, melibatkan perempuan dalam semua proses perdamaian dan keamanan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan serta membuat kesetaraan gender sebagai pusat untuk perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran. UN Women juga memiliki mandat universal yang mengharuskan UN Women untuk mempromosikan pergeseran besar dalam tindakan dan norma negara, stereotip gender, mengubah norma-norma sosial serta praktek diskriminasi yang tertanam dalam budaya, tradisi dan agama.⁶⁴ Langkah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait penjaminan hak perempuan dalam kehidupannya yang masih mengalami diskriminasi.

⁶³ Ayuningtiyas, S, 2016, *Peranan UN Women dalam Melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender*, Universitas Pasundan hal.50

⁶⁴Puri L, 2016, *Gender equality is the biggest transformer and enabler for achieving sustainable development* diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/5/lakshmi-puri-speech-at-call-to-action-event> Pada tanggal 10 Agustus pukul 08:00 WIB

4.1.2. UN Women dan Partisipasi Politik

Di tingkat lokal menuju tingkat global, kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan sangatlah dibatasi. Perempuan menghadapi beberapa kendala untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik seperti halnya hambatan struktural melalui hukum yang diskriminatif dan lembaga yang masih membatasi pilihan perempuan untuk mencalonkan diri.⁶⁵ Adanya kesenjangan pendidikan yang dihadapi perempuan dengan laki-laki membuat sumber daya perempuan menjadi pemimpin yang efektif serta tingkat partisipasi global perempuan di parlemen tingkat nasional sangatlah kecil. Pada 1 Juli 2017, tingkat partisipasi global perempuan di parlemen tingkat nasional sebesar 23,5 persen.⁶⁶

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2011 tentang perempuan dan partisipasi politik menjelaskan bahwa perempuan di setiap bagian dari dunia dan sebagian besar telah terpinggirkan oleh politik. Hal ini seringkali diakibatkan dari undang-undang, praktik, sikap dan stereotip gender, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses kesehatan dan kemiskinan terhadap perempuan.⁶⁷

UN Women sebagai organisasi internasional dalam mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjelaskan bahwa partisipasi politik perempuan merupakan prasyarat mendasar untuk kesetaraan gender dan demokrasi.⁶⁸ Hal ini memfasilitasi keterlibatan perempuan untuk terjun langsung dalam pengambilan keputusan publik serta sebagai sarana untuk memastikan perempuan untuk

⁶⁵ UN Women, *Women's leadership and political participation*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation> pada tanggal 10 Agustus pukul 08:45 WIB

⁶⁶ IPU, 2017, *Women in National Parliaments*, Diakses melalui <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm> pada tanggal 10 Agustus pukul 09:45 WIB

⁶⁷ UN Women, *Women's leadership and political participation*, *Loc. cit*

⁶⁸ UN Women Asia and The Pacific, *Political Participation of Women*, Diakses melalui <http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/political-participation-of-women> pada tanggal 10 Agustus pukul 10:30 WIB

mendapatkan haknya dalam bidang politik. Selain itu, dibutuhkan reformasi tata pemerintahan yang peka terhadap gender agar semua pejabat yang akan terpilih dapat lebih efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kebijakan publik serta implementasinya dapat terjamin.

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak perempuan, UN Women memajukan partisipasi politik perempuan dan pemerintahan untuk mendukung hak perempuan sebagai bentuk dari respon dalam mendukung kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif, responsif, adil dan inklusif. Bentuk kerjasama telah dilakukan UN Women dengan banyak pemangku kepentingan seperti organisasi perempuan, pemerintah, sistem PBB dan sektor swasta untuk membawa perubahan akan pentingnya perempuan untuk masuk di ranah politik. Perubahan yang akan UN Women lakukan di bidang politik ini seperti mendukung perempuan untuk berkontribusi ke dalam pemerintahan, melatih pemimpin perempuan dan meningkatkan keterampilan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan sebagai kandidat dan pemilih.

Dalam menunjukkan kinerjanya tersebut, UN Women telah melaporkan beberapa hasil yang telah dicapai melalui situs web resminya dalam meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan pada tahun 2013. Dalam situs resmi UN Women, negara anggotanya yang dilaporkan mengalami perubahan dalam kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan adalah:⁶⁹

⁶⁹ UN Women, *Women's Leadership and Political Participation*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un-womenlgtthembriefuswebrev2-pdf.pdf?la=en> pada tanggal 10 Agustus pukul 11:15 WIB

Tabel 4.1 Laporan Kinerja UN Women dalam Mendukung Kepemimpinan dan Partisipasi Politik perempuan

Negara	Tahun	Keterangan
Timor Leste	2012	Setelah pemilu di tahun 2012, Timor-Leste memiliki proporsi tertinggi legislator perempuan di Asia. Proporsi tertinggi tersebut sebesar 38 persen melebihi kuota sepertiga yang dimandatkan menurut hukum. UN Women yang bekerja sama dengan UNDP telah hadir dan berperan penting dalam mendukung parlemen perempuan yang aktif dalam merencanakan kebijakan terhadap kelompok dan masyarakat sipil serta unit gender nasional agar dapat mempromosikan kandidat perempuan
Pakistan	2012	Pada saat pendaftaran pemilih perempuan, Otoritas Pendaftaran dan Database Nasional melaporkan lebih dari 40 juta perempuan mewakili 86 persen populasi perempuan, serta meningkat dari 44 persen dari tahun 2008. Selain itu, untuk pertama kalinya Komisi Pemilihan Umum Pakistan, didukung oleh UN Women dan UNDP memiliki sistem pengumpulan data pemilih berdasarkan jenis kelamin, yang mana dapat membantu menentukan hambatan hak-hak sipil perempuan.
Kenya	2013	Pada saat pemilu jumlah perempuan legislator naik dua kali lipat menjadi 22 persen dibandingkan pemilihan sebelumnya. UN Women memberikan kontribusi terhadap hasil tersebut dengan memberikan pelatihan hampir 900 kandidat perempuan di 47 kabupaten dan menjalankan kampanye untuk perempuan dalam kepemimpinan agar dapat mendorong pemilih untuk memilih perempuan.
Zimbabwe	2013	Negara Zimbabwe telah membuat konstitusi baru mengenai hak-hak perempuan yang telah ditandatangani menjadi undang-undang di Zimbabwe pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan perempuan memperoleh peningkatan sebesar 35 persen di kursi pemilu pada tahun 2013 dibandingkan pada pemilu sebelumnya di tahun 2008 hanya sebesar 17 persen. Dibalik terobosan tersebut terdapat 20 kelompok pendukung kesetaraan gender yang terdiri dari aktivis, politisi dan ilmuwan dan semuanya tersebut didukung oleh UN Women.

Maka dari itu UN Women hadir dan menawarkan solusi untuk mendukung kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam politik. Solusi yang ditawarkan UN Women tersebut diantaranya :⁷⁰

1. Komitmen internasional untuk representasi perempuan dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan serta menjunjung tinggi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
2. Dalam Platform Aksi Beijing menyerukan penghilangan hambatan untuk mencapai partisipasi yang setara. Tujuannya adalah mengukur kemajuan kesetaraan gender dalam proporsi perempuan di kursi parlemen.
3. Memberikan pelatihan untuk kandidat perempuan berpolitik dalam membantu membangun kapasitas politik mereka.
4. Menawarkan kampanye kependidikan, kependudukan dan kepekaan tentang kesetaraan gender.
5. Mendukung advokat kesetaraan gender dalam menyerukan partai politik, pemerintah dan pemuda-pemuda mendorong dan terlibat dalam advokasi seputar gender.

Langkah-langkah yang dibuat UN Women untuk kesetaraan tersebut ditujukan bagi para pembuat kebijakan publik agar lebih peka terhadap isu seputar gender. UN Women telah mendukung legislatif dan konstitusional reformasi untuk memastikan akses adil perempuan terhadap bidang politik sebagai pemilih, kandidat, pejabat terpilih dan pegawai negeri sipil. Negara anggota PBB dan UN Women turut serta melakukan kolaborasi untuk menjunjung tinggi hak perempuan

⁷⁰ UN Women, *Women's leadership and political participation*, *Loc.cit*

termasuk memilih dan dipilih dalam pemilu serta terbebas dari kekerasan selama pemilihan.

4.1.3. UN Women di Afghanistan

Pasca Taliban runtuh, pada tahun 2002 Afghanistan membuat hubungan kerjasama dengan UNIFEM untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan dalam mencapai kesetaraan hak-hak mereka. Sebagai dana PBB yang dibentuk khusus untuk mendukung perempuan, UNIFEM bekerja di Afghanistan untuk menyoroti kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam upaya rekonstruksi. UNIFEM telah mengembangkan strateginya serta berkonsultasi dengan perempuan Afghanistan terkait konteks sejarah dan budaya di Afghanistan.

Kinerja yang telah UNIFEM berikan dalam membantu meningkatkan kesetaraan dan mendukung perempuan Afghanistan yaitu :⁷¹

1. Bekerja sama dengan *Ministry of Women's Affairs* (MOWA) dan membentuk Pusat Pengembangan perempuan guna mendukung hak perempuan pasca Taliban.
2. Mempromosikan persepektif gender dan hak-hak perempuan dengan melakukan lobi, penyediaan nasihat dan advokasi.
3. Mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan perdamaian dengan cara mengarustamakan gender ke dalam undang-undang serta kebijakan yang dibuat.

⁷¹ Saltmarshe, D & Kouvo, S, 2007, *Supporting Women's Leadership in Rebuilding Afghanistan 2002-2006*, Hal. 39

4. Bekerjasama dengan Radio dan Televisi Nasional Afghanistan untuk memberikan informasi terkait pemilu.

Namun pada tahun 2010 UN Women menggantikan UNIFEM sebagai entitas barunya untuk memastikan visi dan perencanaan jangka panjang dalam menjalankan kinerjanya sebagai organisasi internasional pendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Visi dan perencanaan jangka panjang UN Women diwujudkan melalui peningkatan koordinasi dan hubungan kemitraan baik di dalam maupun di luar keanggotaan PBB untuk memastikan hasil yang telah dicapai UNIFEM memiliki dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.

Melihat keadaan perempuan di Afghanistan yang masih mengalami diskriminasi, UN Women kemudian memperjuangkan hak perempuan di Afghanistan untuk menjadikan perempuan dan laki-laki di negara tersebut setara. UN Women sebagai organisasi internasional dalam mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, mempunyai peran di Afghanistan untuk memberikan solusi dalam merubah posisi dan mengatur kembali pemerintahan demi mendukung dan mempromosikan penerapan nasional untuk kesetaraan gender. Hasil yang telah dicapai UN Women dalam mendukung kesetaraan gender di Afghanistan adalah dengan dibentuknya ACO (*UN Women Afghanistan Country Office*).⁷² Program yang dijalankan oleh ACO di Afghanistan ini berfokus dalam menghilangkan kekerasan terhadap Perempuan, pemberdayaan politik dan ekonomi serta koordinasi dan advokasi dimana masing-masing fokus tersebut memiliki pilarnya sendiri.

⁷² Sutton, J, 2015, *UN Women Afghanistan Development Results Narrative 2014-2017*. Hal 15

Dalam menghilangkan kekerasan terhadap perempuan, melalui *Eliminating Violence Against Women Pillar* (EVAWP) UN Women bekerja untuk menangani kekerasan terhadap perempuan baik dari sisi perlindungan maupun pencegahannya. EVAWP telah memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sangat dibutuhkan kepada Kementerian Urusan Wanita dan masyarakat sipil dalam peningkatan kesadaran untuk mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta pelatihan dan koordinasi antara pemangku kepentingan mengenai reformasi hukum. UN Women juga memiliki kesepakatan tripartit dengan *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *World Health Organization* (WHO) untuk mengembangkan sistem rujukan *Gender Based Violence* (GBV), yang menghubungkan layanan dan penyedia layanan dengan korban GBV.

Berdasarkan dalam bidang pemberdayaan politik dan ekonomi, kinerja UN Women dalam bidang ini difokuskan pada meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu 2014 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merangkul hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan, sehingga memastikan proses pemilihan yang responsif gender. Selanjutnya, UN Women juga melakukan pengembangan kapasitas institusi nasional, pemuda, pemimpin lokal / *influencer* dan akademisi untuk menerapkan konvensi dan resolusi internasional seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, resolusi terkait dan Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam konteks Afghanistan. UN Women juga melakukan pengembangan kapasitas advokat / pemimpin perempuan untuk bertindak sebagai

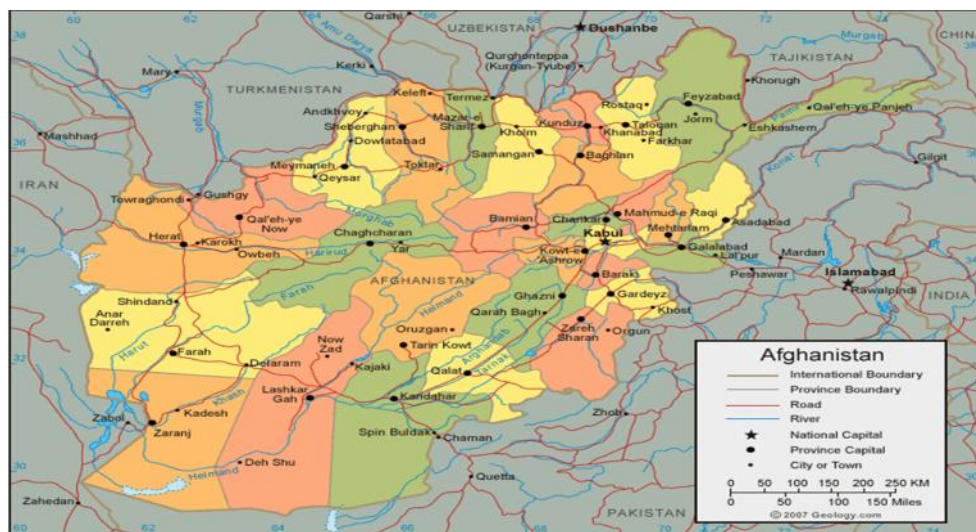
agen perubahan di arena politik untuk mendukung partisipasi perempuan pada pemilu 2014.

Selanjutnya, melalui *Coordination and Advocacy Pillar (CAP)*, UN Women bekerja untuk mendukung penjangkauan ke semua pemangku kepentingan di dalam anggota PBB, komunitas donor internasional dan masyarakat sipil. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban nasional dan internasional mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta melakukan advokasi proaktif mengenai isu-isu permasalahan terkait tentang perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Kinerja CAP ini berfokus pada melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan pemrograman dan prioritas untuk mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

4.2. Afghanistan

4.2.1. Provinsi di Afghanistan

Dalam peta negara Afghanistan, negara ini memiliki 34 provinsi yang akan dijelaskan ke dalam peta dan tabel dibawah ini:



Gambar 2. Peta Negara Afghanistan

Tabel 4.2 : Keterangan setiap provinsi di Afghanistan berdasarkan letak Ibukota

Peta	Provinsi	Ibukota
1	Herat	Herat
2	Farah	Farah
3	Nimruz	Zaranj
4	Badghis	Qala I Naw
5	Faryab	Maymana
6	Ghor	Chaghcharan
7	Helmand	Laskhar Gah
8	Jowzjan	Sheberghan
9	Sar-e Pol	Sar-e Pol
10	Daykundi	Nili
11	Urozgan	Tarinkot
12	Kandahar	Kandahar
13	Balkh	Mazar-i-Sharif
14	Samangan	Samangan
15	Bamyan	Bamyan
16	Ghazni	Ghazni
17	Zabul	Qalat
18	Kunduz	Kunduz
19	Baghlan	Puli Khumri
20	Parwan	Charikar
21	Maidan Wardak	Maidan Shar
22	Kabul	Kabul
23	Logar	Pul-i-Alam
24	Paktia	Gardez
25	Paktika	Sharana
26	Khost	Khost
27	Takhar	Taloqn
28	Panjshir	Bazarak
29	Kapisa	Mahmud-i-raqi
30	Badakhshan	Fayzabad
31	Nuristan	Parun
32	Laghman	Mihtarlam
33	Nangarhar	Jalalabad
34	Kunar	Asadabad

Sumber : Data-data Profil Negara Afghanistan dikutip dari World Factbook.

4.2.2. Populasi

Afghanistan berdasarkan laporan *Central Intelligence Agency* tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebesar 33.332.025 juta jiwa dan mencangkup sekitar 3 juta warga Afghanistan yang tinggal sebagai pengungsi di negara Iran dan

Pakistan. Negara ini menduduki posisi ke-42 sebagai negara paling padat di dunia. Menurut laporan dari *Central Statistics Organization* menyatakan bahwa pada tahun 2011 jumlah total orang Afghanistan yang tinggal di Afghanistan adalah sekitar 26 juta dan pada tahun 2017 mencapai 29,2 juta. Dari total penduduk di tahun 2017 tersebut, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 15 juta dan 14,2 juta nya perempuan.⁷³ Dari total seluruh penduduk yang tinggal di Afghanistan, sekitar 22% penduduknya adalah penduduk perkotaan dan 78% sisanya tinggal di daerah pedesaan.

4.2.3. Pendidikan

Berdasarkan laporan dari *Institute for Statistics* (UIS) atas nama *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), total populasi tingkat melek huruf di Afghanistan adalah 38,2%.⁷⁴ Penyebab kendala rendahnya melek huruf populasi penduduk Afghanistan baik laki- laki maupun perempuan yakni masalah keamanan, kemiskinan, budaya, infrastruktur hingga sumber daya manusia yang terbatas. Adanya aksi ancaman yang dilakukan oleh Taliban baik sebelum maupun setelah pasca Taliban runtuh membuat masyarakat enggan untuk datang ke sekolah dengan mengabaikan keselamatan dirinya. Taliban juga juga menargetkan para guru dengan surat ancaman yang diberikan pada malam hari agar mereka berhenti mengajar di sekolah-sekolah. Dalam tingkat kematian, Afghanistan memiliki 439 guru, pegawai pendidikan dan siswa

⁷³ Hamdard, A, 2017, *Afghan Population 29.2 Million*, Diakses melalui

<http://www.pajhwok.com/en/node/483787> pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 11:30 WIB

⁷⁴ UNESCO, 2015, *Adult literacy rate, population 15+ years (both sexes, female,male)*, Diakses melalui

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en# pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 10:30 WIB

terbunuh di tahun 2006 sehingga tingkat keamanan dalam menuntut pendidikan di negara ini sangat tidak aman.⁷⁵

Selain serangkaian bentuk ancaman yang dilakukan oleh Taliban, mereka juga telah membakar 120 sekolah yang dilaporkan oleh departemen pendidikan. Permasalahan sumber daya manusia yang terbatas berupa guru berkualitas juga menjadi kendala dalam mengatasi pendidikan di Afghanistan. Menurut statistik yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, 80 persen dari 165.000 guru di negara tersebut hanya mencapai pendidikan SMP maupun SMA atau tidak menyelesaikan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.⁷⁶

Dari kendala-kendala yang telah disebutkan tersebut, perempuanlah yang paling tidak diuntungkan untuk mendapatkan pendidikan. Faktor budaya yang tidak mendukung perempuan di Afghanistan membuat perempuan hanya tinggal dan menetap di rumah tanpa harus pergi ke sekolah. Pada dasarnya pendidikan sangatlah penting untuk perkembangan intelektual dan sosial masyarakat dalam menjalani kehidupan produktif sebagai warga negara dan juga bekerja. Dengan adanya dukungan pendidikan maka hal ini dapat mendukung kegiatan penting seperti perbaikan ekonomi, politik maupun hukum di Afghanistan.⁷⁷

4.2.4. Kondisi Politik Afghanistan

Setelah kepemimpinan Taliban di Afghanistan jatuh di tahun 2001, Amerika Serikat mulai memperkenalkan demokrasi di Afghanistan. Sehingga pada tahun

⁷⁵ Najafizada, M, 2008, Afghanistan : Education in a War Zone, Diakses melalui <http://chalkboard.tol.org/afghanistan-education-in-a-war-zone/> pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 10:30 WIB

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ HRW, 2006, *Report in Afghanistan*, Diakses melalui <https://www.hrw.org/reports/2006/afghanistan0706/2.htm> pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 14:30 WIB

2004 Afghanistan menyelenggarakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara demokratis pada pemilihan presiden Afghanistan. Hal tersebut tentunya menjadi awal yang sangat baik bagi Afghanistan sebagai negara yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilu pasca pemerintahan Taliban.

Empat tahun setelah jatuhnya Taliban, sebagai negara yang mendukung terciptanya demokrasi di Afghanistan, Amerika Serikat menghabiskan dana miliaran dolar untuk membiayai pembangunan dan dukungan terhadap pemilu di Afghanistan.⁷⁸ Tetapi, masalah kekerasan yang masih terus terjadi dari sisa-sisa pemerintahan Taliban serta masalah keamanan yang tak kunjung selesai menghalangi pembangunan serta berjalannya proses pemilu di Afghanistan.

Secara politik memang telah tercapai kemajuan besar dengan terpilihnya presiden Hamid Karzai tahun lalu dan akan terselenggaranya pemilu parlemen tahun 2005 namun menjelang pemilihan tersebut pemboman dan penembakan terus terjadi di bagian selatan dan timur Afghanistan.⁷⁹ Hal ini dikarenakan lemahnya institusi militer, polisi Afghanistan serta di dukung dengan gaji polisi yang sangat rendah.

Dalam laporan BBC, pada tahun 2009 menjelang pemilu presiden di Afghanistan kelompok Taliban bersumpah akan mengganggu jalannya pemilu dan menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.⁸⁰ Bagi Taliban pemilu

⁷⁸BBC, 2005, Strategi AS di Afghanistan diragukan, Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2005/11/051123_afghanistan.shtml pada tanggal 7 April 2018 pukul 08:30 WIB

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰BBC, 2009, Aksi Kekerasan Landa Kabul, Diakses Melalui http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/08/090819_kabulviolence.shtml pada tanggal 7 April 2018 pukul 10:30 WIB

sangat bertentangan dengan tradisi Afghanistan dan pemilu dirancang, dibiayai dan digunakan untuk kepentingan Amerika. Meski pengamanan menghadapi pemilu meningkat, kelompok Taliban benar-benar melakukan ancamannya untuk mengganggu pemilu. Sebuah ledakan bom bunuh diri di ibukota Kabul menjadikan sebuah konvoi tentara negara barat sebagai target, menewaskan sepuluh orang dan melukai lebih dari 50 orang. Seorang tentara NATO, sembilan warga setempat, dua staff PBB meninggal akibat ledakan itu dan kelompok Taliban menyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut.⁸¹

Dalam mengganggu proses pemilihan, seorang kandidat pemilu di Provinsi Jowzjan ditembak mati dan tiga petugas pemilu tewas di Badakhshan akibat mobil yang mereka naiki meledak karena bom. Selain itu, dua warga sipil dan tiga tentara Afghanistan juga tewas akibat ledakan bom bunuh diri di selatan provinsi Uruzgan. Saat menjelang pemilu presiden tahun 2009, pejabat pemilihan umum Afghanistan menyatakan pemungutan suara harus ditunda di sepuluh daerah jika keamanan masih belum terjamin.⁸² Kurangnya jaminan keamanan dan adanya wilayah yang tidak mempunyai kendali pemerintah membuat panitia dan calon pengguna hak pilih memiliki ketakutan akan serangan yang akan diberikan oleh Taliban sehingga berdampak pada penurunan pengguna hak pilih dalam pemilu.

Pada pemilihan parlemen tahun 2010 di Afghanistan, masalah keamanan masih menjadi faktor utama kendala pada saat menjelang dan berlangsungnya pemilu. Setidaknya terjadi penculikan 19 orang termasuk caleg anggota parlemen

⁸¹ *Ibid*

⁸² Kompas, 2009, Pemilu Afghanistan Bakal Terhambat, Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/10/21281781/pemilu.afganistan.bakal.terhambat> pada tanggal 7 April 2018 pukul 13:30 WIB

dan petugas pemilu menjelang pemilihan legislatif. Kelompok Taliban telah membunuh setidaknya tiga orang caleg dan beberapa petugas kampanye menjelang Pemilu legislatif. Kelompok Taliban juga mengancam akan melakukan serangan di seluruh Afghanistan, seperti dilakukan dalam pemilihan presiden tahun lalu untuk mengintimidasi para pemilih.⁸³

Meskipun adanya ancaman kekerasan, presiden Afghanistan Hamid Karzai menyerukan agar semua warga Afghanistan ikut memberikan suara pada pemilu. Sekitar 2.500 calon memperebutkan 249 kursi Majelis rendah yang disebut *Wolesi Jirga*. Sebanyak seperempat atau 68 kursi legislatif dikhususkan bagi perempuan dan lebih dari 400 caleg perempuan berpartisipasi dalam pemilu.⁸⁴ Untuk mendukung pemilihan parlemen tahun 2010, sebanyak 300 ribu tentara Afghanistan dan polisi serta didukung oleh pasukan internasional akan mengamankan pemungutan suara di Afghanistan. Tapi sekitar 15 persen dari lebih 6.800 TPS di Afghanistan tidak akan dibuka karena minimnya keamanan.⁸⁵

4.2.5. Hak-Hak Perempuan

Pada masa kepemimpinan Raja Amanullah Khan pada tahun 1919 sampai dengan 1929 sebenarnya konsistensi untuk meningkatkan hak-hak perempuan di Afghanistan telah dilakukan sekaligus ingin memodernisasi negara Afghanistan.⁸⁶ Amanullah Khan sebagai raja mempromosikan kebebasan bagi perempuan di

⁸³VOA, 2010, Taliban Culik Caleg dan Petugas Pemilu Afghanistan, Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-culik-caleg-dan-petugas-pemilu-afghanistan-103171779/83875.html> pada tanggal 7 April 2018 pukul 16:00 WIB

⁸⁴*Ibid*

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶ Keddie, NR, 2007, *Women in the Middle East*. Princeton University Press.

ranah publik untuk mengurangi pengaruh yang dimiliki keluarga patriarkal terhadap perempuan agar perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Dirinya menekankan bahwa perempuan haruslah mendapat pendidikan dan dengan mendorong para orang tua untuk mengirimkan anak perempuannya pergi ke sekolah, Amanullah Khan sekaligus mengadopsi gaya berpakaian yang lebih barat.

Pada tahun 1921, Amanullah Khan membuat sebuah undang-undang untuk menghapuskan pernikahan anak, pernikahan paksa dan pembatasan poligami.⁸⁷ Meski telah dibuat undang-undang tersebut namun pembatasan tersebut hampir tidak mungkin dilaksanakan karena adat istiadat, kepercayaan agama dan masih dianutnya sistem patriarkal di Afghanistan. Bersama dengan istrinya ratu Soraya, Amanullah Khan melakukan reformasi untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan posisi mereka di dalam keluarga. Dampak yang diperoleh dari aksi advokasi reformasi sosial untuk perempuan tersebut menyebabkan aksi demonstrasi serta berkontribusi pada kematian ratu Soraya dan masa kepemimpinan Amanullah Khan.⁸⁸

Sepanjang abad ke 20, negara Afghanistan menjadi negara yang didominasi oleh laki-laki dan suku yang memiliki kendali penuh terhadap perempuan. Pada tahun 1973 negara Afghanistan mendeklarasikan dirinya sebagai negara republik dan sepanjang tahun 1978 sampai 1989 sebuah kelompok komunis yang disebut Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (PDPA) mengambil alih dan berusaha untuk mereformasi undang-undang pernikahan, undang-undang

⁸⁷Skaine, R, 2008, *Women of Afghanistan In The Post-Taliban Era: How Lives Have Changed and Where They Stand Today* . McFarland.

⁸⁸Ghosh, HA, 2003, "A History of Women in Afghanistan:" : Lessons Learnt for the Future or Yesterdays and tomorrow : Women in Afghanistan. Vol.4

kesehatan perempuan serta mendorong pendidikan perempuan.⁸⁹ Hal ini bertujuan agar perempuan terbebas dari tradisi agama yang sangat konservatif dalam memperlakukan perempuan sebagai warga kelas dua di Afghanistan. Selama periode tersebut, Afghanistan membuat kemajuan menuju modernisasi dikarenakan sebagian perempuan mendapatkan kesempatan dalam bekerja sebagai guru, dokter, pegawai negeri serta mempunyai kesempatan dalam menempuh pendidikan.⁹⁰

Selanjutnya di tahun 1990an, hak-hak perempuan yang ada di Afghanistan semakin memburuk dikarenakan berlangsungnya perang saudara dalam perebutan kekuasaan serta terjadinya kasus penculikan, kekerasan hingga pemerkosaan. Puncak kondisi terburuk yang dialami oleh perempuan di Afghanistan adalah ketika berlangsung kepemimpinan Taliban di Afghanistan tahun 1996 sampai dengan 2001.⁹¹ Hak-hak perempuan untuk belajar, bekerja, meninggalkan rumah, mendapatkan akses kesehatan serta keterlibatan dalam politik sangatlah dilarang. Jika mereka tidak menaati peraturan yang telah dibuat oleh Taliban maka hukumannya adalah cambuk bahkan dilempari batu hingga mati jika dinyatakan bersalah melakukan perzinahan.⁹² Selama pemerintahan lima tahun Taliban, perempuan di Afghanistan pada dasarnya berada di bawah tahanan rumah. Menurut Taliban yang ditulis dalam Majalah *Time* berpendapat bahwa

⁸⁹ Armstrong, S, 2003, *Veiled Threat: The Hidden Power of the Women of Afghanistan ..*

⁹⁰ Povey, ER, 2007, *Afghan Women: Identity and Invasion.*

⁹¹ Skaine, R. Loc.Cit

⁹² Amnesty, 2013, *Women in Afghanistan: the back story*, Diakses melalui <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> Pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 09:00 WIB

pembatasan brutal yang mereka berikan terhadap perempuan sebenarnya adalah cara untuk menghormati dan melindungi perempuan.⁹³

Namun setelah jatuhnya Taliban, penjaminan terkait hak-hak perempuan mulai didukung pemerintah Afghanistan. Meskipun telah adanya dukungan yang diberikan pemerintah, perempuan di Afghanistan masih mengalami bentuk-bentuk diskriminasi. Dalam bidang pendidikan, tradisi kebudayaan di keluarga menjadi alasan utama terjadinya diskriminasi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Keluarga menganggap pendidikan untuk perempuan tidaklah penting dan peran mereka hanyalah di dalam dapur maupun di rumah.

Dalam bidang politik, meskipun Undang-undang Afghanistan tahun 2004 telah mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atas hukum dan keterlibatan politik, tetapi perempuan yang sudah mendapatkan kursi di parlemen hanya sebuah simbol, kehadiran mereka tidak dianggap dalam mengambil keputusan.⁹⁴ Seorang politikus perempuan yang aktif dalam politik, sosial dan kebudayaan bernama Shukria Barakzai telah diserang oleh Taliban dengan maksud memperingatkan perempuan Afghanistan bahwa mereka telah melewati batas ideologi Taliban.⁹⁵ Ideologi tersebut menyatakan bahwa perempuan hanya perlu bekerja di rumah untuk mengurus rumah tangga dan tidak diperbolehkan terjun ke ranah politik baik dalam memilih maupun dipilih pada proses pemilu.

Melalui bidang ekonomi, kinerja perempuan dianggap tidak penting dan berada di rumah serta mengurus rumah tangga adalah hal yang paling baik untuk

⁹³ Tim McGirk, 2002, *Lifting The Veil On Taliban Sex Slavery*, Diakses melalui <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,201892,00.html> Pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 10:00 WIB

⁹⁴ Khairunissa, RA, 2017, *Peran United Nations dalam Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan*, Universitas Hasanudin

⁹⁵ *Ibid.* hal. 38

perempuan. Permasalahan buta huruf dan kurang berpendidikannya perempuan juga mempengaruhi peluang mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja, dan hal ini juga didukung oleh pihak keluarga yang masih melarang keluar atau bekerja di luar rumah. Meskipun begitu, pemerintah telah membuat konvensi perempuan pada pasal 11 mengenai ketenagakerjaan yang mewajibkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan kerja dengan beberapa di antaranya hak atas kesempatan kerja yang sama, hak untuk menerima upah yang sama, hak atas jaminan sosial.⁹⁶ Adapun permasalahan perempuan yang terjadi di Afghanistan disebabkan oleh faktor-faktor yaitu:

a. Faktor Budaya

Di Afghanistan untuk menyambut kelahiran, keluarga akan melemparkan buah kering, manisan dan koin bagi kelahiran laki-laki tetapi menutup tirai bagi kelahiran perempuan. Budaya yang masih kental dalam menganut budaya patriarki di Afghanistan berasal dari suku Psthun yang merupakan suku terbesar di Afghanistan dengan jumlah penduduk sebesar 42 persen serta suku Hazara sebesar sembilan persen.⁹⁷ Dalam budaya patriarki di Afghanistan menganggap pendidikan perempuan bukanlah hal yang penting sehingga keluarga melarang anak perempuan mereka untuk bersekolah, dan membuat mereka menghabiskan waktunya hanya di dalam rumah. Budaya patriarki inilah yang menyebabkan dan menjadi salah faktor dalam diskriminasi gender yang dialami perempuan Afghanistan. Budaya patriarki merupakan budaya yang lebih mementingkan garis

⁹⁶ *Ibid.* hal. 39

⁹⁷ CIA, *The World Factbook about Afghanistan*, Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html> pada tanggal 19 juni 2017 pukul 16:30 WIB

keturunan bapak/laki-laki, dimana posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

b. Faktor Hukum

Keterbatasan pemahaman dan keahlian hukum dalam menangani kasus ketidaksetaraan perempuan menjadi pengaruh perempuan Afghanistan masih terdiskriminasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum yang terbatas serta sikap aparat penegak hukum yang menganggap bahwa diskriminasi perempuan adalah tindak pidana ringan dan pengaruh dari peraturan perundang-undangan yang terbatas membuat perempuan Afghanistan masih terdiskriminasi.⁹⁸

Menurut PBB hak-hak perempuan di Afghanistan masih mengalami pelanggaran sehingga perempuan Afghanistan menjadi kelompok tersisih dalam masyarakatnya. PBB telah menghimbau kepada Afghanistan agar dapat mengakhiri praktek-praktek seperti perkawinan anak perempuan dibawah umur, pembunuhan perempuan dengan alasan mempertahankan kehormatan keluarga, serta menyerahkan anak-anak perempuan untuk menyelesaikan sengketa. Untuk mendukung hal tersebut, PBB mendesak pihak berwenang Afghanistan untuk menegakkan Undang-undang tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan agar permasalahan hak-hak perempuan terkait praktek-praktek yang merugikan perempuan dapat terselesaikan.⁹⁹

c. Faktor Keamanan

Permasalahan perempuan Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan, serta menjadi anggota parlemen dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu masih

⁹⁸ Khairunissa, RA, Op.Cit. hal. 41

⁹⁹ VOA, 2010, PBB: Hak-Hak Perempuan Dilanggar di Afghanistan Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-hak-hak-perempuan-dilanggar-di-afghanistan-111638384/87095.html> pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 11: 30 WIB

dikaitkan dengan permasalahan keamanan yang dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan. Perbedaan ideologi serta tradisi yang berubah semenjak pasca Taliban runtuh membuat Taliban melancarkan aksi kekerasan maupun pembunuhan bagi perempuan yang menentang paham Taliban tersebut. Semenjak pasca kepemimpinan Taliban di Afghanistan secara resmi sekolah perempuan maupun calon parlemen perempuan telah didukung untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan maupun politik. Namun karena perdamaian belum terwujud di Afghanistan maka semua upaya tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi perempuan untuk menikmati hak-hak tersebut.¹⁰⁰

Ancaman keamanan berupa teror ditujukan kepada calon perempuan dalam pemilu jika masih terus ikut berpartisipasi dalam pemilu. Sebelum menjelang pemilu, Taliban akan memperingatkan warga Afghanistan termasuk perempuan untuk tidak ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini dikarenakan Taliban bersumpah untuk mengganggu proses pemilu dengan pemboman berbagai lokasi tempat pemungutan suara sehingga mengancam penduduk Afghanistan termasuk perempuan.

4.2.6. Hak Perempuan Pada Pemilu Presiden Tahun 2014

Menjelang pemilu presiden Afghanistan tahun 2014, peran pemerintah sangatlah penting dalam mendukung peningkatan hak perempuan yang selama ini menghambat perempuan dalam menggunakan haknya selama pemilu. Akan tetapi,

¹⁰⁰DW, 2009, Perempuan Afghanistan masih Tertindas, Diakses melalui <http://www.dw.com/id/perempuan-afghanistan-masih-tertindas/a-4066519-1> pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 16: 30 WIB

dukungan dari pemerintah Afghanistan secara langsung dalam membantu peningkatan hak perempuan dalam hak pilih masih kurang memuaskan.

Tabel 4.3 : Peringkat dan peran pemerintah dalam mendukung partisipasi perempuan pada pemilu 2014

Keamanan yang disediakan oleh Pemerintah untuk pusat pemungutan suara perempuan	C	Peringkat	Kelas	Dari	Ke
		Sangat baik	A +	1	1,20
			A	1,21	1,59
			A-	1,60	1,80
Sensitivitas lokasi pusat pemungutan suara untuk kebutuhan perempuan	B	Baik	B +	1,81	2,0
			B	2,01	2,39
			B-	2,40	2,60
Upaya pemerintah untuk menyediakan transportasi ke dan dari pusat pemungutan suara untuk perempuan	C	Cukup	C +	2,61	2,80
			C	2,81	3,19
			C-	3,20	3,40
Upaya pemerintah untuk memberikan informasi tentang pemilihan perempuan	C+	Kurang baik	D +	3,41	3,60
			D	3,61	3,99
			D -	4.0	4.20
		Sangat buruk	E	4.21	5.00

Sumber : Laporan Equality for Peace and Democracy tahun 2015

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa keamanan serta upaya pemerintah untuk menyediakan transportasi untuk menuju tempat pemungutan suara masih terbilang cukup. Permasalahan hak perempuan mengenai jaminan untuk mendapatkan rasa aman dalam pemilu haruslah lebih ditingkatkan oleh pemerintah Afghanistan. Hal ini dikarenakan faktor keamanan dianggap sangat penting melihat salah satu kendala yang dihadapi oleh perempuan untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah faktor tersebut.

Selain dibutuhkannya peningkatan keamanan, upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang pemilih terhadap perempuan masih di dalam

kategori cukup. Pentingnya informasi yang diterima oleh perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sangat bergantung kepada pemahaman mereka akan pentingnya pemilu. Jika informasi pemilu disampaikan secara baik, maka perempuan Afghanistan memiliki pengetahuan akan pentingnya memilih dalam pemilu dikarenakan melalui penggunaan hak pilih mereka tersebut maka dapat mencapai aspirasi yang mereka inginkan sesuai dengan visi maupun misi calon peserta pemilu.

Dalam melihat kategori sensitivitas lokasi tempat pemungutan suara terhadap perempuan yang dilakukan oleh perempuan dapat dinilai baik. Hal ini dikarenakan permasalahan perempuan mengenai kendala budaya dan banyak tempat pemungutan suara yang tidak menyediakan staf pemilunya yakni perempuan. Kendala budaya yang mengharuskan agar tempat pemungutan suara terpisah dengan laki-laki serta staf pemilu dalam menjaga tempat tersebut yang merupakan perempuan, maka dapat meningkatkan alasan perempuan Afghanistan untuk menggunakan hak pilihnya tersebut pada pemilu presiden di tahun 2014.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Peran yang dilakukan UN Women berdasarkan pilar PEEP dan programnya ikut mendukung terjadinya peningkatan dalam hak pilih tahun 2014. Terdapat tiga hal utama yang dilakukan UN Women untuk melaksanakan programnya yaitu: bantuan dana, perlindungan hukum serta bekerjasama dengan mitra lokal
2. Peran organisasi internasional telah dilaksanakan oleh UN Women di Afghanistan
 - a. Sebagai instrumen, Afghanistan menggunakan UN Women untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negaranya mendukung kemerdekaan HAM dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan konstitusi Afghanistan.
 - b. Sebagai arena penyelesaian masalah, UN Women dijadikan tempat mencari dukungan oleh Afghanistan dalam mendukung hak perempuan di Afghanistan. Dalam forum internasional, Afghanistan menggunakan UN Women sebagai arena dalam mencari dukungan untuk mendapat perhatian dunia dalam membuat komitmen mendukung hak perempuan di dunia termasuk hak

- perempuan di Afghanistan. Komitmen dukungan untuk mendukung perempuan khususnya di Afghanistan berupa bantuan dana dan keamanan.
- c. Sebagai aktor independen, UN Women memiliki enam program dan tiga pilar dalam mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Walaupun menurut Clive Archer sebagai aktor independen organisasi internasional tidak terikat dari luar organisasi dan berdiri sendiri, dalam menjalankan programnya UN Women tetap melakukan kerjasama dengan mitra lokal, kementrian dalam negeri dan komisi pemilihan independen.
3. Dalam perspektif feminisme liberal, UN Women melakukan kinerjanya di Afghanistan meliputi bentuk kerjasama dengan pemerintah maupun mitra lokal, melakukan sosialisasi serta memberikan fasilitas dan bantuan dana untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan di Afghanistan

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Pemerintah maupun LSM di Afghanistan harus bekerja dan berusaha lebih keras dalam menjamin hak-hak perempuan di Afghanistan. Permasalahan keamanan maupun budaya yang merugikan perempuan di Afghanistan harus segera diatasi.
2. UN Women dalam menjalankan programnya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sudah cukup baik meskipun harus lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan upaya kerjasamanya dengan pemerintah maupun para pemangku kepentingan dalam menjamin kehidupan perempuan di Afghanistan

3. Pada penelitian selanjutnya, dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang dapat melengkapi kekurangan dalam penelitian ini melalui perspektif maupun sudut pandang lain. Hal tersebut diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan dalam menghadapi kondisi serupa dengan menggunakan berbagai analisis keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, C, 1983, *International Organization*, London: Allen & Unwin Ltd
- Armstrong, S, 2003, *Veiled Threat: The Hidden Power of the Women of Afghanistan*
- Budiardjo, M, 1982, *Partisipasi dan Partai politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : PT.Gramedia
- Fakih, M, 2003, *Menegakan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, Yogyakarta: Insist Press
- Gatara, AAS, & Said, MD, 2007, *Sosiologi Politik : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung
- Holsty, KJ, 1995, *International Politics:A Frame Work for Analysis*,New York Prentise Hall International Inc
- Huberman, M, 1994. *Qualitative Data Analysis*. Dalam Sugiyono 2012. Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung
- Keddie, NR, 2007, *Women in the Middle East*. Princeton University Press
- Kristiadi, J, 2009, *Wants To Be The Next President? A-Z Informasi Politik Dasar & Pemilu 2009*, Cet.1, Kanisius, Yogyakarta
- Marcedes, M, 1999, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Bandung: C.V Abardin
- Megawangi, R, 1999, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka
- Moleong, LJ, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung

Murniati, ANP, 2004, *Getar Gender [Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM]*, Yayasan Indonesia Tera

NDI, 2010, *The 2010 Wolesi Jirga Elections in Afghanistan*

Nizar, M, 2016, *Metedologi Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi*. Universitas Lampung

Povey, ER, 2007, *Afghan Women: Identity and Invasion*, London: Zed Books Ltd

Skaine, R, 2008, *Women of Afghanistan In The Post-Taliban Era: How Lives Have Changed and Where They Stand Today* . McFarland

Stokes, J , 2003. *How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Kajian Media dan Budaya*. Bentang Pustaka: Yogyakarta

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

Tong, RP, 2006 *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta:Jalasutra

Jurnal dan Skripsi

Amelia, CM, 2016, *Upaya UN Women dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan*, Vol 4

Ayuningtiyas, S, 2016, *Peranan UN Women dalam Melindungi Hak-Hak Kaum Perempuan di Somalia dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender*, Universitas Pasundan

Dewi, R, & Rostanty, 2004, *Jurnal Perempuan No.34: Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta

Equality for Peace and Democracy, 2015, *Afghanistan Gender Equality Report Card : Evaluating The Government of Afghanistans Committments to Women and Gender Equality*

- Gross, N, 2005, *Women's Guide to Winning in the 2005 Afghan Elections*, The Roqia Center for Women's Rights
- Ghosh, HA, 2003, "A History of Women in Afghanistan:" : Lessons Learnt for the Future or Yesterdays and tomorrow : Women in Afghanistan. Vol.4
- Khairunissa, RA, 2017, *Peran United Nations dalam Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan*, Universitas Hasanudin
- Larasati, AC, 2012, *Pengaruh Gerakan Feminist Liberal Terhadap Gerakan Perempuan Indonesia, Sebuah Studi Pada Relasi Organisasi Perempuan Internasional dengan Organisasi Perempuan Indonesia (Rifka Annisa, Women Crisis Center) dalam Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Ekonomi Perempuan Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Margesson, R, 2010, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan: Background and Policy Issues*, CRS Report for Congress
- Ma'ruf, Ali , 2005, *Kebijakan Politik dalam Negeri Pemerintah Taliban di Afghanistan Tahun 1996-2001*
- NATO, 2009, *15,6 Million Afghans are Registered to Vote*, Associated Press.
- Powell, C, 2014, *Women and Girls in the Afghanistan Transition*, Council on Foreign Relations Working Paper
- Redaksi, T, 2002, *Perang Afghanistan di Balik Persetujuan AS vs Taliban*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Saltmarshe, D & Kouvo, S, 2007, *Supporting Women's Leadership in Rebuilding Afghanistan 2002-2006*
- Stiftung, HB, 2014, *Menilai Hak-Hak Perempuan di Afghanistan pada tahun 2014*
- Sutton, J, 2015, *UN Women Afghanistan Development Results Narrative 2014-2017*
- Latifah, 2014, *Kontribusi Peran Sosial Perempuan dalam Rubrik Liputan Khas Sukses di Mata Kami pada Majalah Femina*
- Worden, S & Sudhakar, N, 2012 , *Learning from Women's Success in the 2010 Afghan Elections*, The United States Institute of Peace
- Yama, ZDM, 2014, *Peranan UN Women dalam meningkatkan politik perempuan di Timor Leste*, Universitas Pasundan

Internet

- Afghanistan-UN, 2012, *UN WOMEN Lunch Discussion Afghan Women and the Transition*, Diakses melalui <http://afghanistan-un.org/2012/05/un-women-lunch-discussion-afghan-women-and-the-transition/> pada tanggal 24 Februari 2018 Pukul 19:30 WIB
- Amnesty, 2013, *Women in Afghanistan: the back story*, Diakses melalui <https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history> Pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 09:00 WIB
- Athayi, A, 2014, *Shaping the Future – Women’s Participation in the 2014 Elections*, Diakses melalui <https://www.boell.de/en/2014/06/24/shaping-future-womens-participation-2014-elections> pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 09:30 WIB
- Athayi, A, 2014, *Women’s Political Participation* Diakses melalui <https://www.cw4wafghan.ca/sites/default/files/attachments/pages/cw4wafghan-womenpoliticalparticipation-factsheet2014.pdf> pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 10:30 WIB
- AWN, 2011, *Afghan Women's Network, Advocay and Lobbying*, Diakses melalui <http://www.awn-af.net/index.php/cms/content/5> pada tanggal 15 September 2017 pukul 18:30 WIB
- AWN, 2011, *Donars*, Diakses melalui <http://www.awn-af.net/index.php/cms/content/210> Pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 18:30 WIB
- BBC, 2012, *Afghanistan aidL Donors pledge \$16bn at Tokyo mting*, Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-18758148> pada tanggal 5 September 2018 pukul 23:30 WIB
- BBC, 2009, *Aksi Kekerasan Landa Kabul*, Diakses Melalui http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/08/090819_kabulviolence.shtml pada tanggal 7 April 2018 pukul 10:30 WIB
- BBC, 2011, *Konferensi Afghanistan dimulai di Bon*, Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/12/111205_afghanconference pada tanggal 3 September 2018 pukul 08:30 WIB
- BBC, 2012, *Menteri Nato bahas pendanaan Afghanistan*, Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/04/120418_natoafghan pada tanggal 4 September 2018 pukul 15:30 WIB
- BBC, 2014, *Pemilu Afghanistan : Apa yang dipertaruhkan dalam pemilihan presiden* Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-south-asia-26747496> pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 15.30 WIB

- BBC, 2009, *Siapakah Kelompok Taliban?* Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2009/06/090624_talibanhistory.shtml pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 19:30 WIB
- BBC, 2005, Strategi AS di Afghanistan diragukan, Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2005/11/051123_afghanistan.shtml pada tanggal 7 April 2018 pukul 08:30 WIB
- CIA, *The World Factbook about Afghanistan*, Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html> pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 09:30 WIB
- DUHAM, 1948, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia* Diakses melalui <http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf> pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 19:45 WIB
- DW, 2009, Perempuan Afghanistan masih Tertindas, Diakses melalui <http://www.dw.com/id/perempuan-afghanistan-masih-tertindas/a-4066519-1> pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 16: 30 WIB
- ElectionGuide, 2014, *Democracy Assistance & Elections News*, Washington, DC Diakses melalui <http://www.electionguide.org/elections/id/2316/> Pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 15:00 WIB
- Feminist, *Declaration Of The Essential Rights Of Afghan Women*, Diakses melalui www.feminist.org/afghan/declarationtext Pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 08:30 WIB
- Freedomhouse, 2001, *Hak Politik*, Diakses melalui <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2001/afghanistan> Pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 19:00 WIB
- Gul, A, 2015, *Amnesty:Afghanistan Gagal Lindungi hak-hak Perempuan*, Diakses melalui <http://www.voaindonesia.com/a/amnesty-afghanistan-gagal-melindungi-hak-hak-perempuan/2709812.html> Pada tanggal 17 Januari pukul 16:10 WIB
- Hamdard, A, 2017, *Afghan Population 29.2 Million*, Diakses melalui <http://www.pajhwok.com/en/node/483787> pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 11:30 WIB
- HRW, 2006, *Report in Afghanistan*, Diakses melalui <https://www.hrw.org/reports/2006/afghanistan0706/2.htm> pada tanggal 26 Juni 2017 pukul 14:30 WIB

- HRW, 2009, *We Have the Promises of the World*, Diakses melalui <https://www.hrw.org/report/2009/12/06/we-have-promises-world/womens-rights-afghanistan> pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 14:30 WIB
- IEC, *Gender Mainstreaming in IEC*, Diakses melalui <http://www.iec.org.af/2012-05-29-07-06-38/gender-mainstreaming> pada tanggal 25 September 2017 pukul 10:30 WIB
- IEC, *Vision and mission*, Diakses melalui <http://www.iec.org.af/2012-05-29-07-06-38/vision-mission> pada tanggal 19 September 2017 pukul 08:30 WIB
- Institute of Peace and Conflict Studies, 2011, *Bonn II: From Transition to Transformation in Afghanistan* Diakses melalui <https://reliefweb.int/report/afghanistan/bonn-ii-transition-transformation-afghanistan> pada tanggal 5 September 2018 pukul 08:30 WIB
- IPU, 2017, *Women in National Parliaments*, Diakses melalui <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm> pada tanggal 10 Agustus pukul 09:45 WIB
- Kompas, 2012, *Jadwal Penarikan Pasukan NATO Disepakati*, Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2012/05/22/11445010/jadwal.penarikan.pasukan.nato.disepakati> pada tanggal 4 September 2018 pukul 07:30 WIB.
- Kompas, 2009, *Pemilu Afghanistan Bakal Terhambat*, Diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/10/21281781/pemilu.afganistan.bakal.terhambat> pada tanggal 7 April 2018 pukul 13:30 WIB
- MoFA, 2011, *President Hamid Karzai statement to 66th UN General Assembly delivered by Foreign Minister Dr. Zalmi Rassou*, Diakses melalui <http://www.mfa.gov.af/News/3633> pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 11:45 WIB
- MoWA, *MoWA History*, Diakses melalui <http://mowa.gov.af/en/page/1331/1332/mowa-history> pada tanggal 14 September 2017 pukul 19:30 WIB
- MoWA, *Program/Project*, Diakses melalui <http://mowa.gov.af/en/page/donors-programs/un-women/programproject> pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 14:30 WIB
- MRRD, 2006, *Gender policy*, diakses melalui [http://mrrd.gov.af/Content/files/English%20Gender%20Policy%20Final\(2\).pdf](http://mrrd.gov.af/Content/files/English%20Gender%20Policy%20Final(2).pdf) Pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 11:15 WIB
- Najafizada, M, 2008, *Afghanistan : Education in a War Zone*, Diakses melalui <http://chalkboard.tol.org/afghanistan-education-in-a-war-zone/> pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 10:30 WIB

- National, BL & Authorities, N, 2009, *Afghanistan: Law of 2009 - Shiite Personal Status Law* Diakses melalui <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4a24ed5b2> Pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 21:00 WIB
- Peaceinsight, *Afghan Women's Network*, Diakses melalui <https://www.peaceinsight.org/conflicts/afghanistan/peacebuilding-organisations/afghan-womens-network-awn/> pada tanggal 17 September 2017 pukul 19:30 WIB
- Puri L, 2016, *Gender equality is the biggest transformer and enabler for achieving sustainable development* diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/5/lakshmi-puri-speech-at-call-to-action-event> Pada tanggal 10 Agustus pukul 08:00 WIB
- RAWA, *Beberapa pembatasan yang diberlakukan oleh Taliban pada perempuan di Afghanistan*, Diakses melalui <http://www.rawa.org/rules.htm> pada tanggal 18 Desember 2016 pukul 19:30 WIB
- Samad, K, 2014, *The irreversible journey of Afghan women*, Washington Post Diakses melalui <https://gulfnnews.com/opinion/thinkers/the-irreversible-journey-of-afghan-women-1.1318811> pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 15:30 WIB
- Tim McGirk, 2002, *Lifting The Veil On Taliban Sex Slavery*, Diakses melalui <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,201892,00.html> Pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 10:00 WIB
- UN, 2011, *Afghanistan and the International Community From Transition to the Transformation Decade*, Diakses melalui https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_111205_BonnConference.pdf pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 10:30 WIB
- UN, 2012, *At major conference, Ban calls for continued international engagement with Afghanistan*, Diakses melalui <https://news.un.org/en/story/2012/07/415002-major-conference-ban-calls-continued-international-engagement-afghanistan> pada tanggal 5 September 2018 pukul 19:30 WIB.
- UN, 2012, *The Tokyo Declaration Partnership for Self-Reliance in Afghanistan From Transition to Transformation*, Diakses melalui <https://peacemaker.un.org/node/1807> pada tanggal 5 September 2018 pukul 20:45 WIB.
- UNIFEM, *Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan (UNIFEM)*, Diakses melalui <http://orgs.tigweb.org/united-nations-development-fund-for-women-unifem> pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 15:30 WIB

- UNESCO, 2015, *Adult literacy rate, population 15+ years (both sexes, female,male)*, Diakses melalui http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en# pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 10:30 WIB
- U.S Departement of State, 2006, *U.S. Commitment to Women in Afghanistan*, Diakses melalui <https://2001-2009.state.gov/g/wi/rls/58651.htm> pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 18:30 WIB
- UN Women, *About UN Women*, diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> Pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 16:15 WIB
- UN Women Asia and The Pacific, *Afghanistan Programmes*, Diakses melalui <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/programmes> pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 08:30 WIB.
- UN Women Asia and The Pacific, *Frequently Asked Questions*, Diakses melalui <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/fiji/faq> pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 17:00 WIB
- UN Women, *Fund for Gender Equality*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality> pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 14:15 WIB
- UN Women, 2012, *Human Rights: UN Women Strategy*, Diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/focus-areas/humanrights/un-women-strategy/>, pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16:45 WIB
- UN Women, 2012, *Inclusion of Protection for Women and Girls Central to Transition Security Sector Framework for Afghanistan*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/5/inclusion-of-protections-for-women-and-girls-central-to-transition-security-sector-framework-for-afg> pada tanggal 4 September 2018 pukul 13:30 WIB
- UN Women, 2013, *In Afghanistan, women and girls strive to get an education* , Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/afghani-women-strive-to-get-an-education> pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 15:50 WIB
- UN Women, 2014, *Op-ed: Afghan Women's Voices in Elections: Changing the Game* Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/4/oped-on-afghan-elections> pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 15:30 WIB.
- UN Women, 2013, *Phumzile Mlambo-Ngcuka from South Africa appointed as new UN Women Executive Director*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/7/phumzile-mlambo-ngcuka->

appointed-as-new-un-women-executive-director pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 16:00 WIB

UN Women Asia and The Pacific, *Political Participation of Women*, Diakses melalui <http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/political-participation-of-women> pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 10:30 WIB

UN Women, *Result at a Glance*, Diakses melalui <http://www.unwomensouthasia.org/about-us/results-at-a-glance/>. pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 18:30 WIB

UN Women. UN Women Afghanistan Diakses melalui <http://afghanistan.unwomen.org/> pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 10:30 WIB

UN Women, 2012, UN Women condemns violence against Afghan women and calls for justice, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/7/un-women-condemns-violence-against-afghan-women-and-calls-for-justice> pada tanggal 25 Agustus 2018 Pukul 10:30 WIB

UN Women, 2010, *UN Women Engagement in Afghanistan*, Diakses melalui <http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/1/un-women-engagement-in-afghanistan> pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 15:30 WIB

UN Women, *UN Women in Afghanistan*, Diakses melalui <https://papersmart.unmeetings.org/media2/7650566/un-women-afghanistan-background-one-pager-pdf>. pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 13:15 WIB

UN Women, 2011, *UN Women Launches Multi-Province Project on Ending Violence against Women in Afghanistan* Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/10/un-women-launches-multi-province-project-on-ending-violence-against-women-in-afghanistan> pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 11:30 WIB.

UN Women, 2011, UN Women Urges Full Participation of Women in the Road Ahead from Bonn, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/12/un-women-urges-full-participation-of-afghan-women-in-the-road-ahead-from-bonn> pada tanggal 5 September 2018 pukul 10:30 WIB.

UN Women, *Women's leadership and political participation*, Diakses melalui <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation> pada tanggal 10 Agustus pukul 08:45 WIB

VOA, 2011, Bonn Conference Offers Few Details for Afghanistan Past 2014 Diakses melalui <https://www.voanews.com/a/article---bonn-conference-offers-few-details-on-supporting-afghanistan-past-2014-135103068/168263.html> pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 15:30 WIB

VOA, 2010, PBB: Hak-Hak Perempuan Dilanggar di Afghanistan Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-hak-hak-perempuan-dilanggar-di-afghanistan-111638384/87095.html> pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 11: 30 WIB

VOA, 2010, Taliban Culik Caleg dan Petugas Pemilu Afghanistan, Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-culik-caleg-dan-petugas-pemilu-afghanistan-103171779/83875.html> pada tanggal 7 April 2018 pukul 16:00 WIB